

**PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN PETANI RUMPUT LAUT DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH**

**(Studi kasus Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang Kabupaten
Takalar)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Gelar Sarjana Hukum
Prodi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar
Oleh :

Muh. Agus Mallarangang

Nim : 10200117021

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Agus Mallarangang
Nim : 10200117021
Jurusan : Hukum TataNegara (HTN)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Tempat/Tgl Lahir : Takalar, 16 Agustus 1999
Alamat : Bontolebang, Desa.Moncongkomba
Judul Skripsi :Peran Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Rumput Laut dalam perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus Desa. Punaga, Kecamatan. Mangarabombang, Kabupaten. Takalar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar diperoleh karena batal demi hukum.

Samata-Gowa,

Penyusun

Muh. Agus Mallarangang
10200117021

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Peran Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Rumput Laut dalam Perspektif Siyasa Syar’iya (Studi kasus Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar), yang disusun oleh Muh. Agus Mallarangang, NIM: 10200117021, mahasiswa Prodi Hukum TataNegara, pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munqasah dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum TataNegara (Dengan Beberapa Perbaikang).

Samata, 30 Juli 2021 M
20 Zulhijah 1442 H

Ketua	: Dr. H. Muammar Muh. Bakri, Lc., M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr.Hj. Rahmatiah HL, M.Pd.	(.....)
PengujiI	: Drs. H. M.Gazali Suyuti, M.H.I	(.....)
PengujiII	: Dr. Kurniati, S. Ag, M.H	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. Usman, M. Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr.Hamzah Hasan M.H.I	(.....)

Di Sahkan Oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Muammar Muh. Bakri, Lc., M.Ag
NIP. 19731122 200012 1 002

KATA PENGANTAR

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Segala puji hanyalah milik Allah swt, karena atas segala nikmat baik berupa rahmat maupun karunianya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Salam dan selawat semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw, para sahabat serta kerabat beliau, dan juga ummatnya yang senantiasa bersama Rasulullah membawa risalah Allah Swt, sebagai junjungan yang menjadi suri tauladan terhadap seluruh umat manusia dan membawa dunia dari zaman yang gelap gulita menuju jalan yang dipenuhi cahaya karena syafaat yang diberikan kepada seluruh umat manusia.

Kebesaran jiwa, cinta dan kasih sayang yang begitu besar serta doa yang selalu tercurahkan dari kedua orang tuaku, saudaraku yang tercinta, Ayahku Muh. Darwis Dg. Malli, Ibuku Mariyati Dg. Jipa, Kakakku Muh. Nur Rahmatullah yang senantiasa memberi doa dan dukungan, juga nasehat, serta bimbingan secara penuh hingga pada saat ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) sekaligus penyelesaian akhir studi (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Disadari betul bahwa penulis sebagai bagian dari seluruh makhluk Tuhan yang dhaif yang sudah pasti secara sosial sangat membutuhkan bantuan

dari orang lain. Oleh karena itu, terasa sangat bijaksana bila penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada sederetan hamba Allah yang telah memberikan sumbangsih baik berupa bimbingan, dorongan dan bantuan yang mereka berikan kepada penulis kiranya dicatat oleh Allah Swt sebagai amal saleh. Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga selesainya penulisan skripsi ini, dan kepada yang terhormat

1. Ayahanda **Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM).
2. Ayahanda **Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM).
3. Ibunda **Dr. Kurniati, S.Ag., M.H** selaku Ketua dan Ibunda **Dr. Hj. Rahmawati, M.Pd** selaku sekretaris Program Studi Hukum TataNegara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM).
4. Ayahanda **Prof. Dr. Usman, M.Ag** selaku Pembimbing I yang telah bersedia menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, serta arahan kepada penulis.
5. Ayahanda **Dr. Hamzah Hazan, M.H.I** selaku Pembimbing II yang tiada hentinya memberikan semangat dan masukan sehingga skripsi dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan ibu Dosen Program Studi Hukum TataNegara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM). Yang telah menuangkan ilmu dan wawasannya kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Serta staff akademik TataNegara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang ada dikala saya membutuhkan bantuan, Terkhusus kak Basir Staff

operator jurusan Hukum Tata Negara dan kak Mahmuda selaku Staff Akademik Fakultas Syar'ah dan Hukum yang selalu setia dan support saya.

7. Seluruh sahabatku yang saya anggap sebagai saudaraku dikampus para mahasiswa Hukum Tata Negara Kelompok A (CASE LAW) yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang memberikan semangat dan dukungan selama dibangku perkuliahan yang memberikan kebersamaan dan keceriaan kepada penulis.
8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Hukum Tata Negara Angkatan 2017 (AMNESTI) yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang memberikan memberikan semangat dan dukungan selama dibangku perkuliahan yang memberikan kebersamaan dan keceriaan kepada penulis.
9. Sahabat-sahabatku M. Darmawan Tri Febriansyah, Ayu Fajri Karunia dan Galuh Pricilla, Humairah Latifah yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis serta memberikan keceriaan dan kebahagiaan dari candaan-candaan
10. Serta Sahabat-sahabatku Muhammad Resky Idris dan ST. Fausiah yang telah memberi dukungan serta semangat kepada penulis.
11. Kepada ALSC (Alauddin Law Study Centre) yang telah memberi wadah kepada saya sehingga bisa mendapatkan ilmu yang saya tidak dapatkan di perkuliahan
12. Kepada Karang Taruna Moncongkomba Gassing Gau' yang telah memberikan semangat dalam menjalankan penelitian
13. Kepada seluruh masyarakat Desa Punaga, terkhusus kepada Informan yang telah menerima penulis dengan baik hati.
14. Serta semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terimakasih serta do'a semoga Allah Swt membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik. Baikanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin

Moncongkomba-Takalar

Penulis

Muh. Agus Mallarangang

10200117021



DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	18
A. Peran Pemerintah	18
B. Peningkatan Kesejahteraan.....	26
C. Undang-undang No.7 Tahun 2016.....	45
D. Siyasah Syar’Iyah.....	46
E. Kerangka Konseptual.....	53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	54
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	54
B. Pendekatan Penelitian.....	57
C. Sumber Data.....	57
D. Metode Pengumpulan Data.....	58
E. Instrumen Penelitian.....	59

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	60
G. Pengujian Keabsahan Data.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	62
A. Gambaran Umum Desa Punaga.....	62
B. Identitas Informan.....	71
C. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam meningkatkan Kesejahteraan petani rumput laut	73
D. Pandangan Siyasah Syar'iyah Terhadap Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Rumput Laut	81
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran / Implikasi Penelitian.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titi di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	”	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	”	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,,).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya

sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, Yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>Fathah an yā</i>	Ai	a dan i
أو	<i>Fathah an wau</i>	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...إ...أ	<i>fathah dan alif atau yā</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dan yā</i>	ī	i dan garis diatas
و	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis diatas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah lambang *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang di ber tanda *syaddah*. Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan translasi huruf hamzah menjadi opostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak melambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak lagi di tulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah , dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *tā marbutah*di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan dan huruf pertama pada permulaan kalimat). Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK, dan DR).



ABSTRAK

Nama : Muh. Agus Mallarangang

Nim : 10200117021

**Judul :Peran Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan
Petani Rumput Laut dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi
Kasus Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten
Takalar)**

Skripsi ini membahas tentang Peran Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Rumput Laut dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah*. Adapun yang menjadi Pokok permasalahannya 1) bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam meningkatkan kesejahteraan petani rumput laut? 2) bagaimana pandangan *Siyasah Syar'iyah* terhadap peran pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan petani rumput laut?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field kualitatif research*. Sedangkan pengumpulan data menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui literatur-literatur dan artikel yang relevan dengan penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1).pemerintah daerah Telah melaksanakan perannya dalam peningkatan kesejahteraan Petani Rumput laut, namu pemberian yang dilakukan secara bertahab sehingga maysrakat merasa penyaluran tidak merata. 2). Pemerintah merupakan tombak penegak kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga peran Pemerintah sangat dibutuhkan dalam perubahan masyarakat Desa Punaga. Siyasah Syar'iyah memandang bahwa kepala daerah sebisa mungkin mengayomi masyarkat dan mensejahterakan rakyat. Sebagai pemerintah yang baik maka sudah seharusnya untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakatnya.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Bentuk pengawasan oleh pemerintah Dearah harus di perketat dalam penyaluran bantuan serta sosialisasi terhadap Masyarakat 2) Masyarakat yang mendapatkan kejanggalan terhadap penyaluran agar segera melaporkan kepada yang berwajib.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan wilayah tropis yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang dilewati garis khatulistiwa, hal ini yang menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia didominasi oleh wilayah pesisir. Indonesia dikelilingi oleh konfigurasi pulau-pulau besar dan pulau kecil yang berjumlah 17.504 buah, terbentang sepanjang 3.977 mil dengan garis pantai 99,093 km. Berdasarkan hasil keputusan UNCLOS pada tahun 1982 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kepulauan dengan jumlah penduduk Indonesia berdasarkan survei penduduk antar sensus (SUPAS) Badan Pusat Statistik tahun 2015 sebanyak 255,18 juta jiwa.¹

Berdasarkan letak geografis, wilayah Indonesia ialah daerah tropis. Dimana daerah tropis merupakan daerah yang sangat cocok dalam perkembangan pertanian, dibandingkan daerah lain di dunia. Hal ini dikarenakan daerah tropis hanya memiliki dua musim yakni musim kemarau dan musim penghujan.

Masyarakat Indonesia pada umumnya dikenal sebagai masyarakat tani yang dimana masyarakatnya bekerja di sektor agraria maupun sektor pesisir. Masyarakat tani adalah orang-orang yang mengelola usaha tani dalam

¹Badan Pusat Statistik, *Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 2015*, (Jakarta: BPS, 2016),

berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan dan sebagainya.² Dahulu sampai dengan sekarang masyarakat masih bergantung kepada sektor pertanian baik secara konvensional maupun modern dalam melanjutkan proses penghidupannya, dikarenakan nenek moyang bangsa Indonesia merupakan seorang petani.

Masyarakat Agraria adalah masyarakat yang mengalami masa transisi dari masyarakat yang khas agraria ke masyarakat yang khas industri.³ Yang dimana masyarakat yang awalnya mengelolah pertanian secara tradisional kian berubah menjadi modern karena perkembangan zaman. Masyarakat Pesisir adalah sekelompok masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir yang membentuk dan memiliki kebudayaan khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan.⁴ Masyarakat pesisir sangat mengandalkan Pemanfaatan lahan kawasan pesisir,⁵ sumber daya yang ada di laut maupun di pantai sebagai sumber mata pencaharian.

²Rendra Kurniawan dan Aji Dedi Mulawarman, *Inspirasi dari Ladang: Akuntansi Pertanian Nusantara*, (Jakarta: yayasan Rumah Peneleh, 2016), h.71

³Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah abad Terakhir* (Yogyakarta: ISEI, 2005), h.221

⁴Hendri J.D. Tamboto dan Allen A.Ch.Mandagi, *Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pasisir Berbasis Literasi Ekonomi dan Modal Sosial*, (Malang: CV.Seribu Bintang, 2019) h.89.

⁵Andi Idham AP, " pemanfaatan lahan kawasan pesisir galesong berbasis analisis resiko bencana abrasi", Plano Madani, Vol. 4, Nomor. 2 (Januari 2015), h.27.

Perbedaan mendasar yang terdapat antara masyarakat pesisir dan masyarakat agraris yaitu terletak pada akses terhadap sumber daya alamnya. sangat berbeda dengan sumber daya lahan pada masyarakat agraris, sedangkan masyarakat pesisir menggunakan laut sebagai sumber daya alamnya. Pada umumnya masyarakat yang bermukim di daerah pesisir yang tersebar di Indonesia ialah bekerja sebagai Nelayan dan petambak ikan. Keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya modal dalam menunjang aktivitas mengakibatkan banyaknya nelayan dan petambak ikan yang tidak beroperasi lagi.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, yang tercantum dalam BAB II pasal 3 yang berbunyi.⁶ *“perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam bertujuan untuk :*

- a. Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha.*
- b. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan.*
- c. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam ; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan*

⁶Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, BAB II Pasal 3

usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan.

- d. Menumbuhkan system dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha.*
- e. Melindungi dari resiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran, dan*
- f. Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum”.*

Berdasarkan isi Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa para nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam sangat diberikan ruang dalam meningkatkan kesejahteraan itu terdapat pada Tujuan Undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk memberikan wadah atau sarana dan pradarannya kepada nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam.

Dengan adanya undang-undang ini para nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam diberikan sarana dalam pengembangan usaha serta diberikan pembelajaran mengenai pengelolaan sumber daya laut dan sumber pesisir, serta memberikan perlindungan keamanan dan bantuan hukum. Dalam menopang kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar khususnya pada Desa Punaga, masyarakat bekerja sebagai nelayan dan petani rumput laut namun dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir

masyarakat lebih mengutamakan bertani rumput laut karena pendapatannya lebih besar dan bisa menutupi kebutuhan hidup.

Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar merupakan wilayah pesisir pantai yang masyarakatnya bermukim di daerah pesisir. Kecamatan mangarabombang memiliki luas wilayah sekitar 100,50km² atau sebesar 17,74% dari total luas kabupaten takalar, yang dimana memiliki 11 desa dan 1 kelurahan. Desa punaga adalah salah satu desa yang terdapat di kecamatan mangarabombang yang lokasinya berhadapan langsung dengan laut lepas pantai.

Dalam menopang kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat pasisir desa punaga kecamatan mangarabombang kabupaten takalar masyarakat mengandalkan pekerjaan menjadi nelayan dan pembudi daya rumput laut, tetapi masyarakat cenderung lebih berfokus pada pembudi dayaan rumput laut, itu disebabkan oleh karena pendapatan yang lebih besar.

Letak Desa Punaga yang berhadapan langsung dengan laut lepas yang memiliki perairan ombak yang tenang dan cocok ditempati untuk bercocok tanam rumput laut. Proses bercocoktanam yang dilakukan dengan cara membentangkan bibit yang telah diikatkan pada tali pada lahan yang tersedia serta proses bercocoktanam harus disesuaikan pada musim dikarenakan sewaktu-waktu akan terjadinya perubahan cuaca yang akan berpengaruh pada hasil produksi rumput laut.

Selain permasalahan cuaca yang berubah-ubah, ada banyak hal lagi yang bisa menimbulkan kerugian yaitu penyakit yang terjadi pada rumput laut. Namun, masyarakat belum mengetahui cara mengatasi penyakit tersebut yang bisa merusak dan mengakibatkan gagal panen pada rumput laut. permasalahan selanjutnya yaitu kurangnya ketersediaan modal, pemasaran hasil panen rumput laut, Diversifikasi olahan Rumput Laut dan masih banyak kendala kendala lain yang dihadapinya.

Situasi seperti ini setidaknya peran pemerintah sebagai pemegang kebijakan di daerah muncul dan memberikan penanganan Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2016 tersebut yang telah mengamanatkan pemerintah untuk memberikan perlindungan dan memberdayakan nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan serta menyiapkan sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung lainnya.

Situasi seperti ini setidaknya peran pemerintah sebagai pemegang kebijakan di daerah muncul dan memberikan penanganan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tersebut yang telah mengamanatkan pemerintah untuk memberikan perlindungan dan memberdayakan nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan serta menyiapkan sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung lainnya.

Kehidupan masyarakat adalah sebuah persoalan yang cukup kompleks. Fenomena sosial yang ada seringkali mengacu pada adanya indikasi yang rentan sekali melahirkan perbedaan dan bahkan perselisihan dalam persepsi dan interpretasi. Hal ini dikarenakan persoalan kemanusiaan sangat erat hubungannya dengan perubahan dan perkembangan sosial.⁷ Masalah serta isu yang terkadang lahir dalam masyarakat dapat membuat sebuah persepsi. Masalah nepotisme merupakan isu yang selalu aktual diperbincangkan seakan menjadi aktual karena masalah nepotisme merupakan persoalan moral dan budaya yang tumbuh dan berkembang dan hamper semua aspek.⁸

Pemberian bantuan oleh pemerintah harus dilakukan dengan pengawasan serta pemahaman terhadap masyarakat yang belum mendapatkan giliran bantuan sehingga tidak timbul persepsi persepsi baru yang dapat menimbulkan kesalah pahaman terhadap pemerintah. Sesuai dengan fungsi Negara dalam pengelolaan pemerintahan dapat dilihat melalui pemikiran para ahli. John Locke Misalnya, mengemukakan bahwa pada dasarnya fungsi Negara dapat diamati pada tiga hal yaitu: a) Fungsi legislasi, yakni, b) Fungsi

⁷Hamzah. "Konflik dan Ketegangan Dalam Hukum Islam Antara Stabilitas dan Perubahan". Ad-daulah. Vol. 4 No. 2, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2015, hal. 265.

⁸Kurniati. "Nepotisme dalam Perspektif Hadis (Kritik sanad dan matan Hadis)". Ad-daulah. Vol. 4 No. 1, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2015, hal. 117.

Eksekutif dan c) Fungsi Federatif.⁹ Dari fungsi Negara tersebut dapat dilihat bahwa fungsi legislasi yakni membuat undang-undang, pembuatan aturan tentang pengelolaan Pertanian Rumput laut guna peningkatan kualitas kesejahteraan petani rumput laut dapat memberikan dampak yang baik terhadap penjaminan kepada petani Rumput laut, kemudian dilanjutkan dengan fungsi yang kedua yakni fungsi eksekutif yaitu fungsi untuk melaksanakan peraturan, pemerintah yang berwenang.¹⁰

Dalam pelaksanaan hal tersebut tidak terlepas dari peran kekuasaan. Seorang filsafat barat yang bernama Jien Bodiem meberiakan sebuah definisi tentang kekuasaan yaitu sesuatu kekuatan tertinggi yang bersifat abadi, tidak diwakilkan atau didelegasikan, tanpa batasan atau dibatasi oleh kondisi, tidak dapat dicabut dan tidak tertulis, karena kekuasaan adalah sumber hukum maka hukum tentu tidak dapat membatasi kekuasaan tersebut.¹¹ Sedangkan jeans Jacques Rousseau menggabungkan antara teori kekuasaan Hobbes dengan teori John Locke yang dikenal dengan “Populer Consent”. Gabungan antara dua teori tersebut kemudian melahirkan konsep kekuasaan Filsafat

⁹Usman “Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik)”. Ad-daulah. Vol. 4 No. 1, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2015, h. 134.

¹⁰Adriana Mustafa, “Evektivitas Perjanjian Laut antara Anak Buah Kapal menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008”, al-Daulah Vol.5. No. 2, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2015, h..259.

¹¹Usman Jafar, “Kekuasaan dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi atas Pemikiran Politik Islam). al-Daulah. Vol. 6 No. 2, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2017, h. 348.

kekuasaan populer atau kekuasaan yang berasal dari kehendak umum.¹²

Dengan kedua konsep kekuasaan tersebut dapat menjelaskan arti kekuasaan.

Dari permasalahan tentang pemberian bantuan oleh pemerintah daerah yang tidak merata membuat masyarakat berspekulasi negatif. Sehingga pemerintah harus memberikan pemahaman terhadap penyaluran tersebut. Pemerintah seharusnya memberikan wadah yakni berupa pendidikan tentang pengelolaan rumput laut, setelah dilakukannya wawancara yang dilakukan dengan Petani Rumput laut, masih banyak yang melakukan dengan cara tanam tradisional tanpa adanya proteksi terhadap tanaman.

Sebagaimana anjuran agama islam, bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mempertanggung jawabkan segala keluhan rakyatnya. Seperti dalam halnya masalah yang terjadi pada petani rumput laut di desa punaga kecamatan mangarabombang kabupaten takalar yang sudah seharusnya pemerintah mengambil tindakan ketika masalah yang dikeluhkan masyarakat belum terselesaikan kemudian pemerintah hanya diam saja dan bungkam.

perkataan Al-Thabari dalam suatu riwayat bahwa pemimpin suatu kaum bertanggung jawab terhadap urusan kaumnya, sehingga pemerintah diberikan wewenang dalam merealisasikan tanggung jawabnya. Maksudnya

¹²Usman Jafar, “*Kekuasaan dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi atas Pemikiran Politik Islam)*”. al-Daulah, Vol. 6 No. 2, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2017, h. 348.

yaitu pemimpin berhak mengeluarkan kebijakan yang memberikan dampak positif terhadap masyarakat yang sangat bermanfaat untuk kemaslahatan umat.¹³

Islam pun telah mengajarkan kepada manusia dalam mengolah sumber daya alam yang dimiliki. Tinggal bagaimana peran pemerintah dalam mengelolanya dan mendistribusikan kepada masyarakat. Hal ini termasuk potensi hasil dari laut. Sebab dalam Islam telah berulang-ulang kali menyebutkan potensi kelautan merupakan sumber daya yang melimpah ruah untuk digunakan untuk kemaslahatan umat.

Dari penjelasan diatas, Peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul *“Peran Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan kesejahteraan Petani Rumput Laut dalam Perspektif siyasah Syar’iyah (studi kasus Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar)”*

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

- a. Peran Pemerintah Daerah
- b. Peningkatan Kesejahteraan
- c. *Siyasah Syar’iyah*

¹³M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Mizan: Bandung, 2001) h.405

2. Deskripsi Fokus

- a. Peran pemerintah Daerah merupakan kebijakan dalam membangun sebuah kawasan atau daerah di wilayah tertentu dalam skala pemerintahan guna meningkatkan perekonomian daerah, dalam hal ini berfokus pada kebijakan pemanfaatan sumber daya alam yaitu rumput laut di Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar.
- b. Peningkatan Kesejahteraan merupakan proses masyarakat dalam mengubah pola hidup, pola pikir guna meningkatkan taraf kualitas hidup, seperti dalam perekonomian dalam menunjang dan melanjutkan kehidupannya.
- c. Siyasah Syar'iyah merupakan opini atau doktrin pemerintah yang berlandaskan hukum islam

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari Latar Belakang tersebut, maka Pokok Masalah pada Penelitian ini yaitu : Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Rumput Laut dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar) ?.

Berkaitan dengan Pokok Masalah Tersebut, Maka Sub Masalah dalam Penelitian Ini Yaitu :

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam meningkatkan Kesejahteraan petani rumput laut menurut ?
2. Bagaimana pandangan Siyasah Syar'iyah Terhadap Peran Pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan Petani rumput laut di Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar?

D. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Soni Abner Damamain dan Dr. Nunuk Dwi Retnadari, Dalam Jurnal *“Peran pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program pemberdayaan budidaya rumput laut (studi kasus budi daya rumput laut di desa sathean)* jurnal ini membahas tentang peranan pemerintah terhadap penunjang kualitas hidup masyarakat pesisir dengan program pemberdayaan rumput laut. Dalam jurnal juga menjelaskan pentingnya program pemerintah tersebut karena melihat kondisi masyarakat kabupaten Maluku Tenggara yang kehidupan sehari-hari hanya bergantung pada hasil perkebunan yang hanya dapat mencukupi makan dan minum saja, sehingga pemerintah terus meningkatkan peranannya melalui fungsi pemberdayaan dengan memberdayakan masyarakat pesisir melalui program budidaya rumput laut. Jurnal ini sangat membantu peneliti untuk menambah referensi. Tetapi, jurnal tersebut tidak menjelaskan tentang peran pemerintah daerah terhadap peningkatan kesejahteraan petani rumput laut dalam perspektif Siyasah Syar'iyah di desa Punaga kecamatan Mangarabombang kabupaten Takalar.
2. Ine Fausayana, dalam buku *“Dinamika Pembudidayaan Rumput Laut dari kontestasi Hingga Model Design Bank Rumput Laut”* membahas tentang peran pemerintah dalam memotivasi masyarakat mulai dari level kelompok

hingga level mikro. Pemerintah disini memberikan wadah kepada para petanoi rumput laut untuk penunjang budidayanya, pemerintah juga memberikan bantuan kepada petani rumput laut hingga sampai kepada pembuatan bank rumput laut. Pada penelitian ini tidak menjelaskan bagaimana peran Pemerintah dalam penjamina kepada petani rumput laut.

3. Imam Muhammad, dalam jurnal “*Studi tentang pemberdayaan masyarakat petani rumput laut di Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan*”, Pemberdayaan masyarakat petani rumput laut menjadi salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab, sebagaimana pasal 57 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Dalam mendukung terwujudnya Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu “Indonesia penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar 2015”. Dalam jurnal ini tidak membahas peran pemerintah terhadap peningkatan petani rumput laut dalam Perspektif Syiyasah Syar’iyyah di desa Punaga kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar.
4. Kurniati, dalam Jurnal “*SISTEM POLITIK DEMOKRASI DALAM BIAS HEGEMONI NEGARA: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci*”, Sistem politik demokrasi dalam bias hegemoni negara telah mengilhami argumen politik Antonio Gramsci. Gramsci telah berkontribusi dalam pemikiran tentang reorientasi hegemoni negara yang diilhami oleh

Marxisme dengan menambahkan pemikiran tentang kerangka politik. Hegemoni dan demokrasi harus disesuaikan secara politis untuk mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis yang dapat menjadi konsensus aktif sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif di mana negara, dengan menggunakan otoritasnya dalam hegemoni, memfasilitasi masyarakat dalam hal mengenai penyetaraan hak. Jurnal ini memberikan kita penjelasan tentang kebebasan, demokrasi serta peran pemerintah dalam Negara. Tetapi jurnal ini tidak membahas tentang peran pemerintah daerah terhadap peningkatan kesejahteraan petani rumput laut.

5. Arief Setiawan Yusuf, dalam jurnal *“Membangun Daerah Perbatasan Dengan Rumput Laut”*, Keberhasilan budidaya rumput laut di Nunukan tidak terlepas dari peran Bank Indonesia (BI). Pada 8 September 2011, BI secara resmi ikut berpartisipasi membangun rumput laut Nunukan, melalui penanda tanganan kerjasama Pengembangan rumput laut di Kabupaten Nunukan dengan pemkab Nunukan. Nota kesepahaman itu bernomor 13/3A/DKBU/Smr dan No. 180/15/523.36/HK/VIII/2011, ditanda tangani kepala perwakilan bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, bapak Androecia Darwis dengan Bupati Nunukan Bapak Drs. H. Basri. Untuk memperkuat pelaksanaan di lapangan selanjutnya Bank Indonesia dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan menanda tangani perjanjian kerja sama bernomor 14/7/dkbu/bpbu/Smr dalam rangka program pengembangan klaster rumput laut di Kabupaten Nunukan.

Dalam Jurnal ini sangat membantu penulis, disini kita bisa ketahui bahwasanya jika ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat petani rumput laut bisa menghasilkan rumput laut yang bagus dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat

6. Syafiuddin dan Amri Jahi, dalam Jurnal penyuluhan “*hubungan karakteristik individu dengan kompetensi Wirausaha petani rumput laut di Sulawesi Selatan*”, Beberapa kelemahan antara lain karena apresiasi petani terhadap kualitas rumput laut yang rendah. Petani masih lemah pada berbagai aspek terutama pada aspek teknis budidaya, aspek manajerial atau aspek kewirausahaan. Akibatnya, akses mereka untuk memperoleh harga yang lebih baik masih kurang dan hasil produksinya kurang sesuai standar. Pada jurnal yang di tulis oleh syafiuddin dan amri jahi tidak membahas bagaimana peran pemerintah Sedangkan rencana penelitian yang akan diteliti ialah bagaimana peran pemerintah dalam ningkatkan kesejahteraan petani rumput laut dalam perseptif Siyasa Syar’iyyah.
7. Riasdy Ibnu Khaldun dalam jurnal “*strategi kebijakan peningkatan daya saing rumput laut indonesia di pasar global*” Membahas tentang peran pemerintah indonesai dalam upaya meningkatkan daya saing produk rumput laut sehingga dapat bersaing pada pasar global. Pada jurnal ini memberikan gambaran tentang strategi pemasaran produk hasil rumput laut sehingga dapat bersaing guna menunjang terpenuhinya kebutuhan hidup para petani rumput lau. Jurnal ini hanya membahs tentang strategi

peningkatan daya saing rumput laut dan tidak membahas tentang bagaimana peran pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan petani rumput laut dalam perspektif Siyasah Syar'iyah di desa Punaga kecamatan Mangarabombang kabupaten Takalar.

8. Zainal Abidin S dalam Jurnal *“kontribusi usaha budidaya rumput laut dalam memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”* membahas tentang pengembangan rumput laut pada kabupaten pangkajene dan kepulauan memiliki peranan yang sangat strategis. Selain sebagai pembukaan lapangan kerja, budi daya rumput laut juga sangat penting mengingat pendapatan masyarakat di kabupaten pangkajene dan kepulauan. Saat ini, budidaya rumput laut telah berkontribusi besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan lapangan kerja di kabupaten pangkajene dan kepulauan. Pemerintah sangat berperan penting terhadap peningkatan kesejahteraan serta strategi pemasaran bagi kelompok petani rumput laut. Pada pada jurnal ini tidak membahas secara spesifik tentang peran pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan petani rumput laut dan juga tidak membahas mengenai perspektif siyasah syar'iyah di desa punaga kecamatan mangarabombang kabupaten takalar.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Sub Masalah, Maka Tujuan yang akan dicapai yaitu:

- a. Untuk mengetahui Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam meningkatkan Kesejahteraan petani rumput laut
- b. Untuk mengetahui Pandangan Siyasah Syar'iyah terhadap Peran Pemerintah dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Rumput Laut di Desa Punaga kecamatan mangarabombang Kabupaten Takalar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan pengetahuan sebagai cakrawala keilmuan dan pengalaman yang menitik beratkan pada pengembangan masyarakat dalam akademik maupun ilmiah. Serta sebagai referensi tentang peran pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan petani rumput laut di Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar
- b. Sebagai salah satu masukan untuk instansi pemerintahan untuk lebih memperhatikan pengembangan masyarakat Pesisir, sehingga masyarakat pesisir tidak tebelenggu oleh ketertinggalan karena tidak adanya pelatihan oleh pemerintah untuk pengembangan pengetuahun.
- c. Untuk Peneliti secara Pribadi sangat berguna, karena hal ini merupakan pertama kali menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Peran Pemerintah Daerah

1. Peran

Soerjono Soekanto dalam bukunya *sosiologi suatu pengantar* menjelaskan bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan tersebut mencakup 3 hal, yakni ;

- a) Peranan yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam suatu masyarakat
- b) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- c) Peranan juga sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan di masyarakat. Posisi atau tempat seseorang dalam suatu masyarakat (social position) merupakan unsur yang statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri sebagai suatu

¹Soerjono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.217

proses. Dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki tempat atau posisi dalam bermasyarakat dan menjalankan suatu peranan.

Peran menurut Harton dan Hunt adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status dalam bermasyarakat. Sebagai peran yang tergabung dalam dan terkait pada suatu status ini oleh Merton dinamakan perangkat peran. dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat peran-peran tersebut.

Sedangkan Paulus Wirutomo berpendapat bahwa peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Pada pandangan ini, peranan-peranan dalam pekerjaan, keluarga, kekuasaan dan peranan-peranan lainnya, yang diciptakan oleh masyarakat bagi manusia.²

2. Pemerintah

Lahirnya pemerintah dan keberadaan pemerintah merupakan keharusan bagi proses kehidupan bermasyarakat, sejarah telah menjelaskan bahwa sekecil apapun kelompok atau individu sangat membutuhkan adanya pelayannya pemerintah. Ini mengabarkan bahwa kehidupan sehari telah mengabarkan fungsi-fungsi pemerintah dalam bermasyarakat.

²Paulus Wirutomo, *pokok-poko pikiran dalam sosiologi David Berry* (Jakarta : PT. Raja Geravindo Persada, 2003), h. 105

Secara umum pemerintah dapat di artikan sebagai seluruh yang mencakup kelengkapan Negara, yang menjadi cabang cabang kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudisial atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk atas anama Negara.

Dalam Bahasa Indonesia *Government* atau pemerintah memiliki arti sebuah pengarah dan administrasi mengenai aktivitas atau kegiatan bermasyarakat, dalam kota, dalam sebuah Negara, dan sebagainya. Dan dapat pula di artikan sebagai badan atau lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan.

W.S Sayre berpendapat bahwa pemerintah adalah organisasi dari Negara yang menunjukkan dan menjalankan kekuasaannya, sedangkan pengertian lain yang dikemukakan oleh David Apter yang memberikan pendapat bahwa pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang masing-masing memiliki tanggung jawab tertentu guna mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang berkaitan dengan kekuasaan paksaannya.³

Secara historis, pemerintah daerah telah dikenal sejak adanya pemerintahan kerajaan-kerajaan Nenek moyang dahulu sampai pada sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah oada sata penjajahan.

³Inu Kencana syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Refika Aditama, 2010), h.11

Daerah dalam lingkungan pemerintah mencakup sebagai bagian muka bumi seperti lingkungan kerja pemerintah, selingkup tempat yang dipakai dalam tujuan khusus, tempat sekeliling dalam lingkungan suatu kota, dan tempat terkena peristiwa yang sama.⁴

C.F Strong berpendapat lain yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah Organisasi yang diberikan hak untuk menjalankan kekuasaan yang berdaulat. Sedangkan pemerintah dalam arti luas memiliki arti suatu yang lebih besar dari pada suatu badan atau kelompok.⁵

Pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang berbunyi bahwa "*pemerintah daerah adalah peneyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".⁶ Dalam Undang-Undang tersebut cukup memberikan pengertian terhadap pemerintah dan memberikan gambaran terhadap pemerintah.

⁴G. Setya Nugraha, R. Maulana F, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, h.145

⁵Fahmi Ambrusi, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Bandung: Nusamedia, 2012), h.28

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 Angka 2.*

Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintah nasional yang memiliki kewenangan mengatur serta mengurus rumah tangga sendiri. Dalam mengatur rumah tangga ada tiga hal penting yang ada didalamnya, yaitu :

1. Pemberian tugas dan wewenang dalam menyelesaikan suatu kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah daerah
 2. Pemberian kepercayaan dan wewenang guna untuk memikirkan, mengambil sebuah inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas dengan mandiri.
 3. Pada upaya memikirkan, berinisiatif dan mengambil keputusan harus mengikut sertakan masyarakat baik secara langsung atau dengan perpanjangan tangan rakyat (DPRD).¹⁴
- a. Kewenangan Pemerintah Daerah

Secara konseptual, istilah kewenangan atau wewenang berasal dari bahasa Belanda yaitu "*bevoegdheid*" yang berarti wewenang atau kuasa. Dalam hukum Tata pemerintahan wewenang merupakan bagian yang sangat penting, karena Pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya tanpa adanya memperoleh wewenang. Dalam menjalankan fungsinya Kewenangan pemerintah dapat dilihat dari konstitusi Negara

¹⁴Setya Retnawati, *Sistem Pemerintahan Daerah DiIndonesia* (Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001), h.8.

yang memberi legitimasi kepada badan publik dan lembaga Negara.¹⁵

Jadi, wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan Negara dalam bentuk undang-undang untuk melaksanakan hubungan dan perbuatan hukum.

Salah satu asas yang dijadikan prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memperoleh legitimasi, yakni kewenangan yang diberikan Undang-Undang. Dengan demikian substansi dari legalitas ialah kewenangan (kemampuan dalam melakukan suatu tindakan hukum tertentu).

Bagir manan menjelaskan bahwa dalam bahasa Hukum, wewenang tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya memberikan gambaran hak untuk melakukan perbuatan atau tidak, sedangkan wewenang ialah hak dan kewajiban.¹⁶ Dalam hal ini, kekuasaan sangat berbeda dengan wewenang.

Pada Pasal 13 Ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah, yang berbunyi, *Berdasarkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota adalah;*

¹⁵SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1997) h.154.

¹⁶Nurwahyuni S.H, *Hukum Administrasi Daerah* (Bandarlampung, Universitas Lampung, 2009), h.26

- a. *Urusan pemerintahan yang lokasi dalam daerah kabupaten/kota*
- b. *Urusan pemerintahan yang penggunaanya dalam daerah kabupaten/kota*
- c. *Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan atau*
- d. *Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.*¹⁷

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut maka Pemerintah daerah berhak mengurus segala permasalahan yang terjadi di wilayah kekuasaannya.

Wewenang harus memiliki sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu:

1. Pengaruh, yaitu bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan subjek Hukum
2. Dasar Hukum, yaitu wewenang yang dimaksud harus memiliki dasar hukum
3. Komformitas, yaitu sebuah hukum yang mengatur adanya standar wewenang baik standar hukum hukum Umum atau semua jenis wewenang maupun standar Khusus atau jenis wewenang tertentu.¹⁸

¹⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah, Pasal 13 Ayat (4)*

¹⁸Philipus M. Hdjon, *Penataan Hukum Administrasi* (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1998), h.2.

Pemberian kewenangan Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya, dilakukan melalui sebuah proses yang disebut Desentralisasi kepada daerah-daerah otonom. Desentralisasi mempunyai dua wujud yaitu :

1. Politik, yaitu kewenangan dalam membuat suatu keputusan dan melaksanakan fungsi kontrol terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah daerah.
2. Administratif, yaitu pemberian delegasi oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan wewenang Kewenangan yang dimaksud mulai dari penetapan sebuah peraturan sama dengan keputusan substansial.¹⁹

B. Peningkatan Kesejahteraan

1. Peningkatan Kesejahteraan

Arti peningkatan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan peningkatan (usaha, kegiatan, dan sebagainya).²⁰

Jadi peningkatan adalah lapisan yang terbentuk dari sesuatu kemudian membentuk susunan, peningkatan berarti kemajuan, penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik.

¹⁹La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang Berkeadilan* (Disertasi Universitas Hasanuddin Makassar, 2015) h.136.

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi V* (cet. I; Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukaan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016)'

Pemerintah berperang penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-perluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Selaian sebagai abdi sosial, pemerintah juga berperan sebagai pendorong inisiatif usaha dari masyarakat.

Kementrian coordinator kesejahteraan rakyat memberi sebuah pengertian sejahtera yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya, yakni terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari, hidup bersih, aman dan nyaman. Serta terpenuhinya hak asasi dan partisipasi dalam terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.²¹

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai dan dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Sedangkan definisi kesejahteraan menurut HAM adalah setiap laki-laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan

²¹www.Menkokesra.go.id., diakses Pada Tanggal 11 Mei 2020 Pukul 12.34 WITA.

jasa sosial, jika tidak, maka hal tersebut telah melanggar HAM.²² Jadi peningkatan kesejahteraan adalah prose atau cara pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan penjaminan keamanan serta kualitas hidup bersih dalam menjalankan hidup bermasyarakat.

a. Prinsip dan Faktor Kesejahteraan

Adapun Beberapa prinsip dari kesejahteraan yaitu:

1. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu
2. Melepas kesulitan harus diprioritaskan disbanding memberi manfaat
3. Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat di korbakan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya hanya yang lebih kecil harus dapat diterima atau di ambil untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

Adapun yang termasuk dari faktor-faktor kesejahteraan adalah:

1. Keadilan dan persaudaraan menyeluruh
2. Nilai-nilai sistem perekonomian

²²Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pmebangun Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2005)

3. Keadilan distribusi pendapatan

Demi terciptanya kesejahteraan maka antara prinsip dan faktor harus sejalan dalam penerapannya.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan secara konseptual berasal dari kata “*power*” yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Oleh karena itu, konsep utama pemberdayaan adalah mengenai konsep kekuasaan.²³

Pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Pemberdayaan Sebagai tujuan, pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial.²⁴

Menurut persons *et.al* proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literature yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu-lawa-satu yakni antar

²³Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h.57

²⁴Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, h.60

pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri klien, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (empowerment setting): Mikro, Mezzo, Makro

1. Aras Mikro, pemberdayaan yang dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
2. Aras Mezzo, pemberdayaan yang dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Aras Makro, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Adapun beberapa strategi dalam pendekatan ini yaitu; perumusan kebijakan, perencanaan sosial,

kempanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, dan manajemen konflik.²⁵

Pemberdayaan masyarakat umumnya dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif jika menampilkan lima karakteristik, yakni :

1. Pemberdayaan masyarakat berbasis lokal adalah perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan dengan melibatkan sumberdaya lokal, dan hasilnya pun dinikmati dinikmati oleh masyarakat itu sendiri
2. Pemberdayaan masyarakat berorientasi kesejahteraan adalah pemberdayaan yang dirancang dan dilaksanakan dengan fokus untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan pada masyarakat sekitar
3. Pemberdayaan masyarakat bersifat holistik, maksudnya ialah mencakup semua aspek sumberdaya lokal seperti alam, budaya, tradisi, yang patut di dayagunakan.
4. Pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan dalam hal ini misalhnya membuka akses bagi masyarakat terhadap teknologi, pasar, pengetahuan modal dan manajemen yang lebih baik serta pergaulan bisnis yang lebih luas sehingga dapat menciptakan lapangan

²⁵Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h.66.

pekerjaan baru, Peran penting dari modal manusia dalam pertumbuhan produktivitas secara luas telah diakui dalam literatur ekonomi.²⁶

5. Pemberdayaan masyarakat berkelanjutan, yaitu suatu kegiatan pemberdayaan yang dilakukan secara terus menerus tidak berhenti pada suatu program yang telah terselesaikan saja, tetapi terus berkesinambungan dengan program yang lain.²⁷

3. Kaitan Pemerintah dengan Kesejahteraan

Pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan sangatlah berperan penting, pemerintah disebut juga sebagai penyelenggara Negara dan harus mengawal serta melaksanakan ideologi Negara. Ideologi Negara Indonesia ialah mewujudkan Negara kesejahteraan sebagai mana yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu tentang tujuan Negara Indonesia yaitu “Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

dalam kaitannya pemerintah memiliki peran besar terhadap peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dengan mengeluarkan sebuah kebijakan mengenai kesejahteraan, dalam mewujudkan kesejahteraan yang dimaksud harus diselenggarakan dengan sistem pemerintahan yang baik,

²⁶Bahrul Ulum Rusydi.dkk,” *peran modal manusia terhadap upah pekerja di kota makassar*”, Bulletin of Economic Studies (BEST), Vol. 1, Nomor 1, (Februari 2021).h.14.

²⁷Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung, PT. Refika Aditama, 2005), h.71.

pembangunan dilaksanakan dengan tertib, prosedural, jujur, adil, efektif, efisien, transparan serta mengajak masyarakat berperan aktif.

Menurut Neong Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan setidaknya harus mengandung empat hal penting didalamnya yaitu;

1. Tingkat hidup masyarakat meningkat
2. Terciptanya keadilan
3. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berperan aktif (dalam membahas tentang masalah, perencanaan, keputusan, dan penerapan), dan
4. Terjaminnya pengembangan berkelanjutan.²⁸

Jadi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat butuh kerjasama antar pemerintah dan masyarakat guna terciptanya keharmonisan. Dalam terlaksananya peningkatan kesejahteraan tersebut sangat berkaitan dengan peran pemerintah yaitu sebagai pembuat kebijakan, pemerintah yang baik akan mementingkan dan mengutamakan kepentingan masyarakat guna peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. lain halnya dengan pemerintah yang hanya mengejar jabatan dan memntingkan diri sendiri,

²⁸Neong Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, Teori Pendidikan Perilaku Sosial Kreatif* (Yogyakarta : Raka Sarasin. 2000) h. 123

pemimpin seperti ini akan menghasilkan kebijakan yang mementingkan diri sendiri diatas kekuasaannya.

4. Hukum Islam dan kesejahteraan

a. Kesejahteraan Menurut Al-Qur'an

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur, selamat (tebebas) dari segala gangguan, kesukaran, keselamatan, kesenangan hidup.²⁹ kesejahteraan ialah keterbebasan seseorang dari segala aspek yang dapat meresahkan dan membebaninya.

Pada Al-Qur'an kesejahteraan meliputi beberapa aspek baik itu spiritual, fisik dan sosial. Secara kemprehensip aspek kesejahteraan ini bersifat interaktif sehingga bila salah satu tidak terpenuhi, maka peningkatan kesejahteraan tersebut tidak dapat terpenuhi. Al-Quran Telah menegaskan tentang menyatunya nilai kesejahteraan dengan nilai pengabdian dan penyembahan Allah, hal tersebut dapat dilihat pada

QS al-Nisa/4:36

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

²⁹Budi Astika, *Gambaran Konsep Sejahtera pada Lansia di Kelurahan Sumbermuljo* (Yogyakarta: Nizam,2010), h.10.

Terjemahnya:

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. dan berbuat baiklah dengan kedua ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”.³⁰

Pada ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban manusia. Secara khusus manusia memiliki kewajiban menyembah kepada Allah Swt, serta beribadah kepadanya dengan khusyuk dan taat dan juga tidak mempersekutuhka dengan sesuatu apapun. Sedangkan kewajiban manusia secara umum yaitu, berbuat baik kepada ibu dan bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga, teman sejawat, ibnu saabil dan hamba sahaya. Seseorang yang dapat memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, maka niscaya ia akan mendapat keberuntungan serta kebahagiaan dan selamat sejahtera dunia akhirat.³¹

Dalam islam kesejahteraan sangat junjung tinggi. Islam mengatur distribusi kekayaan agar tidak hanya beredar pada kalangan atas saja.

Hal ini sesuai dengan QS al-Hasyr/ 59:7

³⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahaannya* (Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015), h.84.

³¹Ayi Erma Azizah, “*konsep Al-Qur'an tentang kesejahteraan sosial (Studi Tafsir Tematik)*”, *Skripsi* (Bantaeng: Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2016), h. 79.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Apa saja harta rampasan fi, I yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah Untuk Allah, rasul, kerabat (rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya”.³²

Surah Ini turun ketika Rasulullah saw bermukim di Madinah, Beliau Berkata kepada kaum Anshor bahwa kaum dari golongan Muhajirin yang ada di Makkah akan berhijrah ke Madina maka beliau meminta kepada kaum dari golongan Anshor untuk memberikan sebagian hartanya dengan menyiapkan kamar-kamar dan makanan kepada kaum Muhajirin, jika kaum dari golongan Anshor tidak mau memberikan sedikit hartanya, maka harta rampasan bagi kaum Anshor tidak ada jatah baginya dan akan diberikan kepada kaum Muhajirin. Dari golongan kaum Anshor lantas berkata bahwa kami akan menyiapkan papan untuk kaum Muhajirin dan tidak akan mengambil bagian dari harta rampasan. Maka turunlah Q.S Al-Hasr ayat 59.³³

³²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h.546.

³³<http://abuchorimuslim.blogspot.com/2012/03/asbabun-nusul-qs-al-hasyr-59ayat-7.html?m=0>
diakses pada tanggal 03 Mei 2021 pukul 15.34 WITA.

Selain penjelasan tersebut, kesejahteraan sosial khususnya stabilitas keamanan akan tercipta dalam sistem masyarakat yang stabil. Stabilitas keamanan akan membentuk stabilitas sosial-ekonomi yang stabil dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut sebagaimana do'a Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam QS al-Baqarah/2:126

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: “Ya Tuhanku, jadikanlah (Negeri Mekah) ini Negeri yang aman dan berkahilah Rezeki berupa Buah-buahan kepada penduduknya, yaitu diantara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudain. Dia (Allah) barfirman: “dan kepada orang-orang kafir akan aku berikan kesenangan sementara, kemudian aku paksa mereka untuk menjalani ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali”.³⁴

Istilah yang digunakan dalam Al-quran untuk kesejahteraan seperti *al-falah*, *aman*, *salam* dan *masalahah*. Diantara istilah-istilah kesejahteraan, “*Al-falah*” merupakan istilah yang memiliki pengertian yang sangat luas dan mendalam serta penggambaran konsep kesejahteraan secara mendasar, istilah ini pun menjadi tujuan akhir dalam kehidupan di Dunia ini.

³⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 19.

Secara bahasa *al-falah* berarti keberuntungan, kesuksesan, dan kelestarian dalam sebuah kenikmatan serta kebaikan.³⁵ Sementara Al-Ragib al-Ashfahani memberikan pengertian bahwa kata *al-falah* dalam kosa kata Al-Qur'an mengandung dua arti yakni duniawi dan kahirawi. Kata *al-falah* secara harfiah berarti mendapatkan atau memperoleh keberuntungan. Dalam konteks duniawi, *al-falah* di tandai dengan keberhasilan dalam mendapatkan kebahagiaan di dunia yang menungjang terciptanya unuk memperoleh hidup yang baik dan menyenangkan secara berkesinambungan, berkecukupan dan bermartabat. Sedangkan *Al-Falah* dalam konteks kehidupan akhirat terdiri atas empat penyangga yaitu:

1. Kabahagiaan kekal abadi tanpa mangalami kebinasaan
2. Berkecukupan tanpa mangalami kafakiran
3. Kemulia tanpa mangalami kehinaan dan,
4. Pengetahuan tanpa mangalami kebodohan,

Sehingga dapat di simpulkan bahwa tidak ada kehidupan sempurna kecuali kehidupan akhirat.³⁶ sebagaimana yag dijelaskan dlam QS al-

‘Ankabut/29:64

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

³⁵Imam Abi Fadl Jamal al-Din Muhammad Ibnu Mukarram Ibnu Manzur al-Ansari, *Lisan al-Arab*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1992), h.647.

³⁶Al-Ragib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat alFaz al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fakr,t.th), h.339.

“Dan kehidupan Dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah yang kehidupan sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui”.³⁷

Konsep kesejahteraan yang ditawarkan Al-Qur'an kepada manusia memiliki dua dimensi yang berpasangan kokoh, serasi, selaras, dan harmonis serta bernilai dasar dalam kehidupan manusia beriman kepada Al-Qur'an, yakni dimensi lahir barin dan dimensi dunia akhirat. Kesejahteraan yang dibangun oleh Al-Qur'an terdiri atas beberapa pilar yakni terpenuhinya :

1. Kebutuhan fisik-biologis
2. Kebutuhan Intelektual
3. Kebutuhab emosional
4. Kebutuhan Spiritual
5. Kebutuhan Sosial

Kebutuhan yang disebutkan tersebut merupakan dimensi lahir dan batin. Berpijak pada pada realitas kehidupan yang menjadi pondasi, motif serta perjuangan untuk mengembangkan kualitas hidup Dunia, tanpa berhenti pada pemenuahn kebutuhan fisik-biologis atau kehidupan kebendaan yang berhenti pada dimensi waktu dan tempat, kini dan disini.³⁸

³⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.404.

³⁸Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, h.2.

b. Kesejahteraan Menurut Hadis

Kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera: aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kesejahteraan: hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman, kesenangan hidup, dan sebagainya; kemakmuran.³⁹ Dalam definisi lain dijelaskan:

*“Kesejahteraan (welfare) adalah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) kehidupan”.*⁴⁰

Kesejahteraan sosial atau *sosial welfare* adalah keadaan sejahtera masyarakat. Dalam *Mu'jam Musthalahâtu al-'Ulûm al-Ijtimâ'iyah* dijelaskan:

“Kesejahteraan sosial: sistem yang mengatur pelayanan sosial dan lembaga-lembaga untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai tingkat kehidupan, kesehatan yang layak dengan tujuan menegakkan hubungan kemasyarakatan yang setara antar individu sesuai dengan kemampuan

³⁹Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal.1284.

⁴⁰Ahmad Zaki Badawi, *Mu'jam Mushthalahâtu al-'Ulûm al-Ijtimâ'iyah* (Beirut, Maktabah Lubnan: New Impression 1982), hal. 445.

pertumbuhan mereka, memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat”.⁴¹

Pemerintah Republik Indonesia mendefinisikan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁴²

Dalam sabda Nabi Muhammad Saw, di kategorikan bahwa Posisi bekerja untuk dunia dan akhirat akan dilihat oleh Allah, Rasul-Nya dan tergolong sebagai orang-orang beriman. Sabda tersebut ialah:

“Apabila seseorang diantara kamu bekerja walaupun didalam batu karang yang keras tiada berpintu ataupun berlobang, niscaya Allah akan mengeluarkannya (agar terlihat) keberadaannya oleh manusia” (HR. Abu Daud).

Kata (*fa-sa-yaro*) yang berarti *“maka akan melihat atau menilai”*, bagi Allah berarti *“Allah akan menilai dan memberi ganjaran”*, sedangkan bagi Rasul saw dan orang beriman berarti *“maka Rasul saw dan orang beriman akan melihat dan menilai”*.⁴³ kata

⁴¹Ahmad Zaki Badawi, *Mu'jam Mushthalahâtu al-'Ulûm al-Ijtimâ'iyah*, (Beirut: Maktabah Lubnan, New Impression 1982), hal. 399.

⁴²Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial.

⁴³Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*; Jakarta: Lentera hati, Volume V, Cet. V, 2012, hal. 237-238.

“melihat/menilai” akan timbul manakala usaha seseorang itu telah nampak, dapat dilihat, atau lebih jauh lagi dapat dibuktikan/dirasakan manfaatnya oleh orang lain.⁴⁴ Hal ini seakan memberikan isyarat bahwa bekerja yang sungguh-sungguh itu akan memberi manfaat tidak hanya untuk dirinya, namun untuk kaum muslimin tidak hanya bermanfaat di dunia namun juga bermanfaat untuk kehidupan akhirat, dan orang yang menerima manfaat tersebut akan menilai dan menjadi saksi di akhirat.⁴⁵ kesaksian yang diperkuat oleh kesaksian Rasul saw dan kesaksian dari Yang Maha Mengetahui yang gaib dan nyata (Allah Swt). Selanjutnya untuk menggali isyarat makna bekerja yang dilakukan pada ranah individu, keluarga/masyarakat dan Negara.

Sebagai manusia yang beriman yang mamiliki niat tulus untuk bekerja secara bersungguh-sungguh dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Maka, tanpa adanya peran pemerintah pun mereka dapat menghidupi keluarganya dengan keterampilan yang dimiliki, terlebih lagi ketika pemerintah turut andil dalam pemberian sarana dan prasaran pendukung bagi masyarakat.

⁴⁴Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa 2008, hal. 836.

⁴⁵Berkata Ibnu Abbas “*Apa yang dinilai baik oleh muslimin baik, maka dia disisi Allah juga baik*”. Lihat Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Jilid 3, Edisi II, 2006), hal.166.

Islam mengajarkan konsep untuk berbagi, membagi nikmat, membagi kebahagiaan dan ketenangan tidak hanya untuk individu namun untuk seluruh umat muslim lintas Negara.⁴⁶ Masyarakat Islam pertama lahir dari Nabi Muhammad Saw., melalui kepribadian beliau yang sangat mengagumkan. Pribadi ini melahirkan keluarga seimbang. Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Fathimah Az-Zahra', dan lain-lain. Kemudian lahir di luar keluarga itu Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a., dan sebagainya, yang juga membentuk keluarga, dan demikian seterusnya, sehingga pada akhirnya terbentuklah masyarakat yang seimbang antara keadilan dan kesejahteraan sosialnya.⁴⁷

Bekerja mencari sumber penghidupan (*ma'ayisha*) adalah senjata utama untuk memerangi kemiskinan, modal pokok dalam mencapai kekayaan, dan faktor dominan dalam menciptakan kemakmuran dunia. Dimana dalam tugas ini Allah Swt telah memilih manusia untuk mengelolanya Q.S 11:61

الْأَرْضِ مِمَّنْ أَنْشَأَكُمْ ۖ هُوَ غَيْرُهُ إِلَّا مِمَّنْ لَكُمْ مَا اللَّهُ اَعْبُدُوا يَقَوْمٍ قَالَ ۖ صَالِحًا أَخَاهُمْ تَمُودَ وَالْيَ مُجِيبٌ قَرِيبٌ رَبِّي ۖ إِنَّ إِلَيْهِ تُؤْبَوْنَ ثُمَّ فَاسْتَعْفَرُوهُ فِيهَا وَاسْتَغْفَرَكَم

⁴⁶Abd Al-Rahman bin 'Abd Al-Khaliq, *Al-Wishoya Al-'Ashr lil 'Amilin bi Al-Da'wah ilallah Subhanahu wa Ta'ala*. Kuwait: Jam'iyah Ihya Turats Al-Islami, Cet. I 1408H/1988H. Hal 69-85.

⁴⁷*Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhlui Atas Berbagai Persoalan Umat*. h.131.

Terjemahnya:

dan kepada kaum samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya)”.⁴⁸

Setelah dijelaskan kisah kaum Nabi Hud dan keingkaran mereka terhadap nabinya serta azab yang ditimpakan kepada mereka, maka ayat berikut ini, menjelaskan tentang kisah kaum Samud. *Dan kepada kaum Samud yang mendiami wilayah Hijr antara kota Madinah dengan Tabuk, Kami utus saudara seketurunan mereka, yaitu Nabi Saleh, dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah Tuhan yang Esa, karena tidak ada Tuhan bagimu yang pantas dan layak disembah selain Dia. Dialah Allah yang telah menciptakanmu dari bumi, yakni Nabi Adam yang diciptakan Allah dari tanah, dan menugaskanmu memakmurkannya, karena kamu memang layak untuk mengurus bumi dengan bercocok tanam, membangun rumah, mendirikan bangunan, gedung-gedung tinggi, dan lain sebagainya. Tapi ternyata di antara kamu ada yang melakukan pelanggaran dengan berbuat kerusakan, seperti eksploitasi hutan maupun hasil bumi secara besar-besaran tanpa menjaga kelestarian dan keseimbangan alam serta lingkungannya. Karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya atas dosa-*

⁴⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

dosa yang kamu lakukan, *kemudian bertobatlah kepada-Nya* dengan meninggalkan perbuatan syirik dan dosa, lalu sembahlah Allah. *Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatNya* kepada orang-orang yang taat *dan memperkenankan* doa hamba-Nya."⁴⁹

Islam sangat mengecam pengangguran, peminta-minta dan orang pasif yang hanya menunggu rizki. Semua usaha dan untuk mencari rizki yang halal dicatat sebagai ibadah. Beberapa kutipan hadis yang menguatkan:

"Senantiasa (ada) yang meminta-minta kepada manusia sampai datang hari kiamat, dan tidak terdapat di wajahnya sepotong daging-pun" (HR. Bukhari Muslim)

"Tidak ada suatu makanan yang lebih baik bagi seseorang, melainkan apa yang dihasilkan dari karya tangannya" (HR. Bukhari)

"Merantau lah kalian, niscaya kalian akan menjadi kaya" (HR. Thabrani).⁵⁰

Segenap jerih payah hasil usaha manusia tersebut dinilai sebagai sedekah baginya, yakni dari harta yang diusahakan dengan cara yang halal dan untuk dibelanjakan di jalan Allah Swt. Adapun hadis yang menjelaskan bahwa seseorang harus bekerja dan tidak boleh

⁴⁹Kementrian Agama RI, *Tafsir Surah Al-Hud Ayat:6*.

⁵⁰Jurnal Ilmu Hadis, Al-Bukhari, Aceh 2018.

dimanjakan untuk memacu kekreativitasannya dalam berfikir “*Tiada seorang muslim pun yang menaburkan benih atau menanam, lalu seekor burung atau seseorang, atau seekor binatang makan sebagian dari padanya, melainkan dinilai sebagai sedekah baginya*”. (HR. Bukhari).⁵¹ Selain itu, ajaran Islam menganjurkan agar tidak memanjakan orang lain atau membatasi kreativitas orang lain, sehingga orang tersebut tidak dapat menolong dirinya sendiri. Bantuan keuangan baru boleh diberikan apabila seseorang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Ketika seseorang datang kepada Nabi Saw. mengadukan kemiskinannya, Nabi Saw. tidak memberinya uang, tetapi kapak agar digunakan untuk mengambil dan mengumpulkan kayu. Dengan demikian, ajaran Islam tentang kesejahteraan sosial ini termasuk di dalamnya ajaran yang mendorong orang untuk kreatif dan bersikap mandiri, tidak banyak bergantung pada orang lain.⁵²

C. Undang-Undang No. 7 Tahun 2016

Undang-Undang No.7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan dan Petambak Garam. Pembuatan undang-undang tentang kelautan ini di perlukan karena undang-undang yang

⁵¹Syekh Muḥammad Yūsuf Al-Qaradlāwī. *Musykilatul Fakri Wa Kaifa 'ālajahal Islām*, diterjemahkan oleh Umar Fanany, B.A, dengan judul *Problema Kemiskinan Apa Konsep Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, Cet. II, 1982, hal, 72.

⁵²Syekh Muḥammad Yūsuf Al-Qaradlāwī. *Musykilatul Fakri Wa Kaifa 'ālajahal Islām*, diterjemahkan oleh Umar Fanany, B.A, dengan judul *Problema Kemiskinan Apa Konsep Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, Cet. II, 1982, hal, 72.

mengatur tentang kelautan dan perikanan masih belum memadai dalam hal mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam sehingga aturan yang ada kurang memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam. Untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam, maka dibuatlah Undang-Undang tersebut.

Undang –undang No 7 tahun 2016 tentang nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam disahkan pada tanggal 14 april 2016 oleh Presiden Jokowi, undang-undang tersebut diundangkan dengan di tempatkan pada lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 68 serta penjelasan atas undang-undang no 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam kedalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870 oleh menteri hukum dan ham.

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf (b) undang-undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan dan petambak garam, “ yang dimaksud dengan “ikan” adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berda didalam lingkungan perairan. Jenis ikan meliputi ;

1. Ikan Bersirip (*pisces*);
2. Udang, Rajungan, kepiting, dan sebangsanya (*crustea*);

3. Karang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (*Mollusca*);
4. Ubur-ubur dan sebangsanya (*coelenterate*);
5. Tripang, bulu babi dan sebangsanya (*Echinodermata*);
6. Kodok dan sebangsanya (*amphibian*);
7. Buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (*reptilian*);
8. Paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (*mammalia*);
9. Rumput laut, tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya didalam air (*algae*);
dan
10. Biota perairan lainya yang berkaitan dengan jenis-jenis diatas Semuanya termasuk bagian-bagiannya.⁵³

Pada penjelasan pasal 9 ayat (1) huruf (b) point (i) Undang-undang No. 7 Tahun 2016 menjelaskan bahwa rumput laut dan sebangsanya (*algae*) termasuk didalam jenis ikan. Berdasarkan Undang-undang tersebut maka dapat disimpilksn bahwa petani rumput laut termasuk dalam golongan pembudidaya ikan. Dengan tergolongnya petani rumput laut kedalam kategori pembudi daya ikan, Sehingga petani rumput laut mendapat kepastian hukum perlindungan dan pemberdayaan

⁵³Republik Indonesia, *Undang- undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan, pembudi daya iakn, dan petambak garam*. Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf (b).

D. *Siyasah Syar'iyah*

1. Pengertian *Siyasah Syar'iyah*

Secara etimologi *Siyasah Syari'iyah* berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i, sedangkan secara terminologi yang dikemukakan oleh Ibnu Akil adalah segala sesuatu tindakan yang secara mudah membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.⁵⁴ Makna dasar dari istilah *siyasah syar'iyah* yang disimpulkan oleh Dr. Athiyah 'Adlan Qarah adalah sebuah tindakan nyata atau keputusan yang diambil oleh penguasa atau pemimpin yang berwenang.⁵⁵

Ibnu taimiyah juga mengupas beberapa masalah yang masuk dalam kewenangan *siyasah syar'iyah*. Pendasaran teori *siyasah syar'iyah* dilandaskan pada QS An-nisa/4:58. Dimana menurut beliau, kedua ayat tersebut merupakan landasan hidup masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat.

Allah Swt berfirman:

⁵⁴Wahbah Zuhaili. *"Ushul Fiqh" Kulliyat da'wah al Islami* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), h.89.

⁵⁵Athiyah 'Adlan Qarah, *Al-Ahkam as-syar'iyah lin-Nawazil As-Siyasah*, h.11.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi maha melihat”.⁵⁶

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Al-Kalbi dari Abu Shaleh bahwa Ibnu Abbas Berkata, “ketika Rasulullah saw. Menaklukkan Mekah, Beliau memanggil Utsman bin Thalhah. Ketika Utsman bin Thalhah datang, Rasulullah saw bersabda “Tunjukkanlah kunci Ka’bah kepadaku”. Lalu dia datang kembali dengan membaw kunci Ka’bah dan menjulurkan tangannya kepada Rasulullah saw sembari membuka telapak tangannya”.

Ketika itu juga Al-Abbas bangkit lalu berkata, “Wahai Rasulullah beriakn kunci itu kepada saya agar tugas memberi minum dan kunci Ka’bah saya pegang sekaligus”. Maka Utsman menggenggam kembali kunci itu. Rasulullah Pun bersabda “Berikan kepadaku Kunci itu wahai Utsman”. Maka Utsman bertkata “ Teriamalah dengan amanah Allah”. lalu Rasulullah saw bangkit dan membuka pintu Ka’bah kemudian beliau melakukan *Thawaf* mengelilingi Ka’bah.

⁵⁶Depertemen Agama RI. *ALWASIM Al-Qur’an tajwid kode, transletirasi perkata dan terjemahan perkata* (Jawa Barat: Cipta Bagus segara.2013),h.76.

Kemudian Jibril turun menyampaikan wahyu kepada Rasulullah saw agar Beliau mengembalikan kunci itu kepada Utsman bin Thalhah. Beliau pun memanggil Utsman dan Membrikan Kunci itu kepadanya kemudian Beliau Membacakan Firman Allah (An-Nisaa':58).⁵⁷

Ayat tersebut berisi tentang kewajiban dan kewenangan seorang pemimpin ialah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil sedangkan kewajiban rakyat ialah taat kepada pemimpin selama ia taat kepada rasulnya. kewajiban penguasa dalam manunaikan amanatnya yaitu mengangkat pejabat dan pegawai secara selektif dan benar. memilih dengan jujur, adil dan amanah serta pembentukan departemen yang dibutuhkan guna menunjang kemajuan dan kesejahteraan Negara. Dalam bidang penegakan hukum, *siyasah syar'iyah* memberikan tugas kepada penguasa untuk membentuk pengadilan mengangkat *qadhi* dan hakim, penegakan hukum yang seadil-adilnya, serta melakukan musyawarah terhadap perkara yang harus di musyawarahkan.

Adapun beberapa hakikat dari *siyasah syar'iyah* yaitu:

- a. Bahwa *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengaturan kehidupan manusia

⁵⁷Jalaluddin As-Suyuthi, *Lubabun Nuquul Fii Asbaabin Nuzuul, atau Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Terj. Tim Abdul Hayyie (Gema Insani), h.172-181.

- b. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini di lakukan oleh pemegang kekuasaan
- c. Tujuan pengaturan tersebut ialah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan
- d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat islam

Berdasarkan hakikat *siyasah syar'iyah* ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok *siyasah syar'iyah* adalah Al-Qur'an dan As-sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan dalam bernegara.

2. Pandanga Siyasah Syar'iyah terhadap pengimplementasian Undang-Undang No.7 Tahun 2016

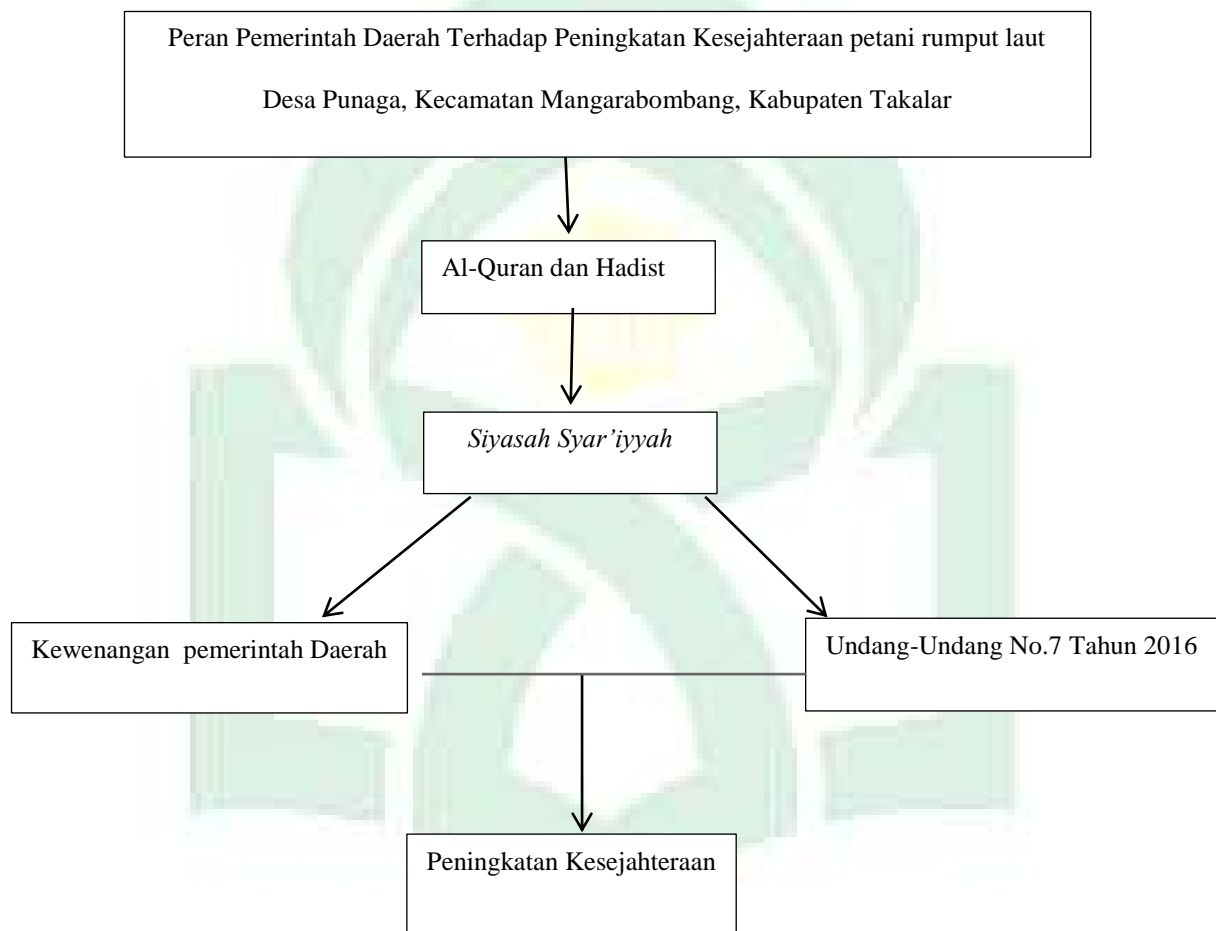
Berlandaskan penjelasan *siyasah syar'iyah* yaitu pemerintah sebagai wakil rakyat yang mengambil atau memutuskan dengan adil dan transparan yang menyangkut kemaslahatan ummat. Dan apabila ada perselisihan antara masyarakat dan pemimpin maka kembalikan pada Al-Qur'an. pemerintah juga berkewajiban menjalankan amanat yang yang diemban dengan sebaik-baiknya seperti halnya dalam memutuskan perkara dengan seadil-adilnya.

Terhadap pelaksanaan Undang-Undang No.7 Tahun 2016 akan efektif jika penerapannya merata atau tersalurkan karena undang-undang tersebut mengandung banyak maslahat bagi masyarakat pesisir

terkhusus pada petani rumput laut yang membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan guna peningkatan taraf kesejahteraan bagi masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan, pembudi daya ikan dan pertambak garam serta terkhusus pada petani rumput laut.

Pemberian bantuan serta pendidikan terhadap sumberdaya laut yang di amankan oleh Undang-Undang melalui pemerintah daerah, guna terciptanya perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan yang pada walnya belum mengetahui atau mengolah sumber daya laut terkhusus pada petani rumput laut akan mengerti dalam pengolahan rumput laut tersebut sehingga petani rumput laut tidak lagi terkendala dalam pemasaran rumput lautnya

E. Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian pada dasarnya yaitu cara ilmiah dalam mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, sehingga hal ini dapat diketahui terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Oleh karena itu, data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat digunakan dalam memahami, memecahkan, dan mengantisipasi permasalahan agar tidak terjadi

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari beberapa aspek, yaitu:

- a. Dilihat dari bidangnya berkaitan dengan hukum dan sosial
- b. Dilihat dari segi tempatnya penelitian skripsi ini ialah Penelitian kualitatif lapangan (*Field Research*)
- c. Dilihat dari segi tujuannya penelitian skripsi ini ialah bersifat deskriptif

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan Desa Punaga merupakan sentra produksi rumput laut.

a. Profil Desa Punaga

Kecamatan Mangarabombang sebagai salah satu kecamatan yang terletak di sebelah selatan dan berjarak kurang lebih 7 kilometer dari ibukota kabupaten Takalar. Ibu kota kecamatan mangarabombang terletak di kelurahan mangadu yang sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto, sebelah selatan berbatasan dengan laut Flores dan sebelah baratnya berbatasan dengan Kecamatan Mappakasunggu serta menjadi pusat perekonomian di kecamatan tersebut. Luas wilayah kecamatan mangarabombang sekitar $100,50\text{km}^2$ atau sebesar 17,74 persen dari kabupaten takalar, Kecamatan tersebut memiliki 11 desa dan 1 kelurahan.

Desa punaga merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan mangarabombang dengan luas daerah $15,74\text{km}^2$, adapun batas-batas wilayah desa punaga yaitu:

Sebelah utara : berbatasan dengan Desa Cikoang

Sebelah selatan : berbatasan dengan laut Flores

Sebelah timur : berbatasan dengan Desa Laikang

Sebelah barat : berbatasan dengan Selat Makassar

Secara administrasi desa punaga terdiri empat wilayah dusun yaitu; dusun punaga, dusun Malelaya, dusun barugaya, dan dusun tamalabba. Adapun penduduk desa punaga yaitu sebagai berikut :

No.	Nama Dusun	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Punaga	404	405
2.	Malelaya	206	246
3.	Barugaya	329	310
4.	Tamalabba	396	426
		1.335	1.387
Total		2.722	

Diambil dari: Profil Desa Punaga Tahun 2017

Tabel tersebut bahwa jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki, dan jumlah laki-laki terbanyak berada pada dusun Punaga yaitu berjumlah 404 jiwa dan jumlah laki-laki yang sedikit berada pada dusun malelaya yaitu berjumlah 206 jiwa, sedangkan jumlah perempuan terbanyak berada pada tamalabba yaitu berjumlah 426 jiwa, dan jumlah perempuan paling sedikit berada didusun malelaya yaitu berjumlah 246 jiwa.

Adapun bentuk pemukiman atau rumah warga pada desa punaga pada umumnya berbentuk rumah panggung dan disesuaikan dengan strata sosial. Adapun bentuk rumah karaeng keturunan Al-aidid sangat berbeda dengan Non Al-aidid, perbedaan utama ditandai dari bentuk atap dan jumlah tingkat yakni tiga tingkatan bagi keturunan Al-aidid.

Desa Punaga juga terdapat pemukiman transmigrasi punaga oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada Penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir yang digunakan dalam menganalisis sasaran yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan pola pikir yang digunakan. Adapun Pendekatan Penelitian yang digunakan ialah:

1. Pendekatan Yuridis adalah suatu metode yang menekankan pada suatu penelitian yang melihat pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Pendekatan Normatif *syar'ī* (teologi Normatif), Pendekatan ini melihat apa yang terdapat dalam Al-Qur'an.
3. Pendekatan Sosiologi dimana suatu pendapat yang melihat kaidah-kaidah yang terdapat pada penelitian Ilmu sosiologi. Dalam penelitian ini mengajak untuk melihat kejadian yang terjadi dimasyarakat

C. Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Data Utama merupakan data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan para Informan. Daftar Pertanyaan dibuat untuk melakukan wawancara bertujuan untuk menghimpun informasi yang dibutuhkan oleh Peneliti.

2. Data sekunder yakni data yang di peroleh dari kantor desa, kantor dinas perikanan, dan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan peneliyian seperti Buku-buku, jurnal, artikel baik dari media atau internet.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, Karena tujuan utama dalam penelitian dalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu iformasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan peneliti, adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitia ini adalah:

1. Observasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung umtuk memperoleh data yang berkaitan dengan objek penelitian mengenai analisis Hukum dan Sosial tentang Peran Pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan Petani Rumput Laut.
2. Wawancara merupakan proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara Lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara lagsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan secara mendalam dan mendetai.⁵⁸
3. Dokumentasi merupakan proses mengumpulkan sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam bahan dan bentuk dokumentasi. Sebagaian besar

⁵⁸Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet.II; Bandung: Alfabeta, 2014), h.155.

data yang ada yaitu terdiri dari surat, catatan harian, cendera mata, artefak, dan foto.⁵⁹

4. Studi keperpustakaan yaitu mengacu pada data-data yang ada yang pernah ditulis peneliti sebelumnya dimana mempunyai hubungan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

E. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada Metodologi Penelitian. Adapun instrumen pada penelitian yang akan digunakan sebagai berikut :

1. Penelitian sebagai instrument utama
2. Pedoman wawancara ialah alat yang digunakan untuk melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.
3. Buku catatan dan alat Tulis adalah alat yang berfungsi mencatat dan menulis semua percakapan dengan Informan
4. Kamera yaitu alat yang digunakan untuk memotret hal-hal penting yang menunjang penelitian seperti memotret peneliti yang sedang melakukan pembicaraan dengan informan.

F. Teknik Pengolah dan Analisis Data

⁵⁹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 141.

1. Pengolahan Data

Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Editing data yaitu Proses pemeriksaan data dari hasil penelitian yang bertujuan untuk mengecek kembali data dan mengetahui relevan (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban dari permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapat data yang factual dan berkualitas sesuai dengan literature yang didapat dari sumber bacaan.
- b. Coding data yaitu proses untuk mengklarifikasikan jawaban-jawaban menurut kriteria atau macam-macam yang ditetapkan.⁶⁰
- c. Identifikasi data yaitu dengan mengumpulkan beberapa Literatur, kemudian memilah-milah dan memisahkan yang akan di bahas.

2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan yaitu analisi data Kualitatif, analisis data deskriptif kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data,

⁶⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.126.

mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literature bacaan.

G. Pengujian Keabsahan Data

Jenis penelitian kualitatif memiliki standarisasi tersendiri dalam menentukan tingkat kepercayaan terhadap sebuah data yang ditemukan lapangan. Pandangan umum terhadap data yang ditemukan dilapangan cenderung individualistic atau dipengaruhi oleh objektivitas peneliti menjadikan data tersebut dinyatakan objektivitasnya. Hal ini tidak terlepas dari instrument penelitian dan validasi peneliti sebagai instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri.

Data yang dihasilkan sesuai dengan temuan peneliti dideskripsikan sesuai dengan pandangan subjektif peneliti mengenai apa yang telah diperoleh selama melakukan penelitian. Penentuan dan penafsiran peneliti terhadap temuan lapangan sangat dipengaruhi oleh intelektual dan analisa peneliti dalam mengelaborasi sebuah data. Sehingga gagasan subjektif yang akan disampaikan tetap mengacu pada konsep rasional yang menjadikan rasio sebagai alat bedah dalam mengurai sebuah data yang diperoleh. Data yang diperoleh peneliti harus berekuivalen dengan realitas yang ada dilapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Punaga

Kecamatan Mangarabombang sebagai salah satu kecamatan yang terletak disebelah selatan dan berjarak kurang lebih 7 kilometer dari ibukota Kabupaten Takalar. Ibu kota Kecamatan Mangarabombang terletak di Kelurahan Mangadu yang sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto, sebelah selatan berbatasan dengan laut Flores dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mappakasunggu serta menjadi pusat perekonomian di kecamatan tersebut. Luas wilayah Kecamatan Mangarabombang sekitar 100,50 km² atau sebesar 17,74 persen dari total Kabupaten Takalar yang memiliki 11 desa dan 1 kelurahan. (Profil Desa Punaga, 2017).

Punaga adalah nama desa di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Punaga Berada di daerah yang cukup terpencil. Jarak Desa Punaga dari Kota Makassar berjarak sekitar 80-60 Km, sekitar 2 Jam. Sedangkan jarak dari jalan Trans Sulawesi Selatan Sekitar 30 Km.

Desa Punaga merupakan salah satu kawasan industri rumput laut yang ada di Kabupaten Takalar. Sebagian besar masyarakat Desa Punaga bekerja sebagai Petani padi dan petani rumput laut. Daerah pesisir pada Desa Punaga dijadikan Sebagai tempat pembudidayaan rumput laut. Sebagian masyarakat Desa Punaga merantau untuk mencari kehidupan mereka yang lebih layak dikarenakan penghasilan sebagai petani rumput laut masih sangat minim sehingga kebutuhannya masih belum terpenuhi. Pembudidayaan rumput laut dilakukan secara mandiri oleh masyarakat setempat. Pembudidayaan rumput

laut didaerah ini masih menggunakan peralatan tradisional dan sebagian besar belajar secara otodidak dalam membudidayakan rumput laut karena belum adanya penyuluhan dari pihak pemerintah setempat.

Desa Punaga merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Mangarabombang dengan luas daerah 15,74 Km².

Batas-batas wilayah:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Cikoang
 Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Flores
 Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Laikang
 Sebelah Barat : Berbatasan dengan Selat Makassar

1. Administrasi Desa

Secara administrasi Desa Punaga terdiri atas empat wilayah dusun yaitu Dusun Punaga, Dusun Malelaya, Dusun Barugaya dan Dusun Tamalabba. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk masing-masing di Desa Punaga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Masing-Masing Dusun Desa Punaga Tahun 2016

No.	Nama Dusun	Jenis kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Punaga	404	405
2.	Malelaya	206	246
3.	Barugaya	329	310
4.	Tamalabba	396	426
		1.335	1.387
Total			2.722

Sumber: Profil Desa Punaga Tahun 2017

Pada tabel 1 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki terbanyak berada di Dusun Punaga yaitu 404 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki

paling sedikit berada di Dusun Malelaya yaitu 206 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan terbanyak berada di Dusun Tamalabba yaitu 426 jiwa dan jumlah penduduk perempuan paling sedikit berada di Dusun Malelaya yaitu 246 jiwa. Hal ini terjadi karena Dusun Malelaya masih kurang penduduk yang menghuni dan terdapatnya kelangkaan atau jarak antara rumah agak berjauhan.

2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan kerja dan juga sangat menentukan dalam klasifikasi pembagian kerja. Perempuan turut aktif dalam dunia kerja, yang mematahkan anggapan bahwa masyarakat Indonesia masih berpola pikir tradisional dimana laki laki merupakan tulang punggung keluarga yang seharusnya bekerja sedangkan perempuan dianggap membantu dan seolah-olah tidak diwajibkan untuk bekerja (Iskandar, 2000).

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Punaga Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Punaga Tahun 2016**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Laki-Laki	1.335	49,05 %
2	Perempuan	1.387	50,95 %
Total		2.722	100%

Sumber: Hasil Sensus PKM Desa Punaga Tahun 2017

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Punaga berjumlah 2.722 jiwa dengan perbandingan laki-laki 1.335 jiwa dengan persentase 49,05% dan perempuan 1.387 jiwa dengan persentase 50,95%. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk jenis kelamin perempuan di Desa Punaga lebih banyak dibandingkan dengan

laki-laki artinya potensi perempuan dalam pembangunan pertanian sangat strategis. Bahkan kontribusi pendapatan perempuan di pedesaan dan pertanian terhadap pendapatan rumah tangga sangat besar. Ini disebabkan karena adanya kesetaraan gender yang menyebabkan laki-laki dan perempuan mempunyai akses yang sama terhadap peluang dan kesempatan serta partisipasi dalam bekerja seperti di bidang pertanian dan perikanan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Priyadi (2005) yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan usahatani mulai tahapan pengolahan, penanaman hingga pengolahan hasil memungkinkan terserapnya tenaga kerja laki-laki dan perempuan

3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Menurut data BPS Kabupaten Purworejo (2012) dalam Firdaus (2017) menjelaskan bahwa pengelompokan penduduk berdasarkan kelompok umur diketahui dengan pengelompokan usia produktif dan usia tidak produktif. Usia 0-14 tahun dikategorikan belum produktif, usia 15-64 tahun dikategorikan usia produktif, dan usia lebih besar dari 65 tahun dikategorikan usia tidak produktif. Usia produktif adalah usia yang dinilai bahwa kemampuan fisik petani cukup potensial untuk bekerja. Usia tidak produktif adalah usia yang dinilai bahwa kemampuan fisik petani tidak cukup potensial dalam bekerja. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Desa Punaga Kec. Mangarabombang Kab. Takalar Tahun 2016

No.	Umur (tahun)	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	≤14	858	31.52
2	15 – 64	1.656	60.83
3	≥ 65	208	7.65

Total	2.722	100%
--------------	--------------	-------------

Sumber: Hasil Sensus PKM Desa Punaga 2017

Tabel 3 menjelaskan bahwa penduduk Desa Punaga rata-rata berumur 15-64 tahun yaitu berjumlah 1.656 jiwa atau sekitar 60,83% dari total jumlah penduduk Punaga. Penduduk yang berada pada usia tersebut termasuk pada usia produktif, artinya penduduk pada usia tersebut dinilai bahwa secara kemampuan fisik cukup potensial untuk melakukan usahatani di kawasan pesisir. Penduduk yang berumur ≤ 14 tahun sebanyak 858 jiwa atau 31,52% dan penduduk yang berumur ≥ 65 tahun sebanyak 208 jiwa atau 7,65% penduduk yang berada pada umur tersebut tidak termasuk umur produktif. Jadi tenaga kerja untuk melakukan usahatani dan pekerjaan lainnya di Desa Punaga sangat mencukupi.

4. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

a. Keadaan Prasarana Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai motor penggerak pembangunan. Banyaknya jumlah sekolah berdasarkan jenjang pendidikan di Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar pada tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 4

Tabel 4. Banyaknya Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar pada Tahun 2016.

Dusun	PAUD/TK/ Klp.Bermain	SD	SM P	SLTA	Akademi	Perguruan Tinggi
Punaga	1	1	1	-	-	-
Malelaya	1	1	-	-	-	-
Barugaya	-	-	-	-	-	-
Tamalabba	1	1	-	-	-	-
Jumlah	3	3	1	-	-	-

Sumber: Hasil Sensus PKM Desa Punaga, 2017

Tabel 4 menjelaskan bahwa jumlah sekolah yang ada di Desa Nisombalia sebanyak 7 unit yang terdiri dari 3 Sekolah Dasar dan 1 Sekolah Menengah Pertama yaitu SMP SATAP. Selain itu juga terdapat pendidikan nonformal yaitu Taman Kanak-kanak sebanyak 3 yang tersebar di beberapa dusun di Desa Punaga. Hal ini menunjukkan bahwa dengan jumlah prasarana pendidikan yang kurang menyebabkan tingkat pendidikan masyarakat juga rendah karena tidak adanya ruang yang dapat digunakan. Untuk sekolah SMP SATAP terdapat di Dusun Punaga Yang lokasinya masih secepat dengan sekolah dasar serta Untuk melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagian anak melanjutkan ke SMA dan SMK diluar Desa Punaga dengan jarak 4 KM.

b. Keadaan Prasarana Keagamaan

Prasarana keagamaan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Menurut Hasil Sensus PKM Desa Punaga (2017), memiliki 5 fasilitas keagamaan atau sarana ibadah yang terbagi pada setiap dusun.

c. Keadaan Sarana Kesehatan, Sanitasi dan Air Bersih

Desa punaga memiliki satu unit puskesmas pembantu (pustu) dengan satu orang bidan yang melayani warga dalam hal pelayanan kesehatan kepada masyarakat Desa Punaga. Mandi Cuci Kakus (MCK) terdapat di semua dusun dan dimanfaatkan warga untuk keperluan mandi dan mencuci tetapi jumlahnya masih sedikit. Dengan adanya MCK dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan dapat menjaga kesehatan warga. Sedangkan Sarana perpipaan dan bak air terdapat di Dusun Tamalabba namun belum maksimal karena hanya sebagian warga yang mendapatkan manfaat dari adanya perpipaan tersebut. Terdapat banyak bak-bak air minum namun belum berfungsi dengan baik. Lain lagi pada Dusun Barugaya, khususnya di kampung salambu hanya ada satu sumur yang digunakan sekitar 90 KK untuk keperluan air bersih. Sarana perpipaan di Dusun Punaga belum menjangkau seluruh warga begitupun yang terjadi di Dusun Malelaya Desa Punaga.

Tabel 5. Jumlah Sarana Kesehatan, Sanitasi dan Air Bersih di Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Tahun 2016

Jenis sarana	Punaga	Malelaya	Barugaya	Tamalabba	Jumlah
Pustu	1	-	-	-	1
Posyandu	1	-	1	-	2
MCK	7	4	4	5	20
Bak air	1	2	-	16	19
Perpipaan	1	1	-	1	3
Wc pribadi	11	7	7	6	31
Sumur	35	9	-	29	73
Jumlah	57	23	12	57	149

Sumber : Hasil Sensus PKM Desa Punaga, 2017

5. Pola Penggunaan Lahan

Desa Punaga Merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Mangarabombang yang wilayahnya sebagian besar adalah pesisir pantai dan masyarakat tinggal dan menetap berhadapan dengan lepas pantai. Ketinggian Desa Punaga ± 18 m diatas permukaan laut.

Desa punaga memiliki iklim tropis dan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan berlangsung selama musim hujan dengan intensitas sedang. Musim hujan mempergaruhi indeks pertanian di desa yang hanya berlangsung selama 6 bulan musim hujan.

Untuk mendapatkan sumber air tawar dari tanah warga harus menggali dengan kedalaman ± 20 meter yang dibuat dengan prakarsa atau dalam bentuk swadaya masyarakat kecuali di Dusun Malelaya pemenuhan kebutuhan air bersihnya cukup memadai karena hampir setiap rumah memiliki sumur gali dengan bantuan mesin pompa air sehingga tidak perlu lagi mengangkat, sebagian keluarga juga mendapatkan sumber air bersih dari perpipaan akan tetapi sebagian keluarga pun masih mengangkat air dari sumur.

Penggunaan tanah di Desa Punaga sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian/persawahan, sisanya berupa tanah kering yang merupakan bangunan, fasilitas lainnya. adapun luas lahan Desa Punaga di bagi dalam 4 dusun dilihat padaa tabel berikut

Tabel 6. Luas Lahan Perdusun Di Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Tahun 2016

No.	Nama Dusun	Luas lahan (Ha/Km)		Jumlah
		Sawah	Tanah kering	
1.	Punaga	392.3	3496.6	3888.9
2.	Malelaya	58.4	1571.1	1629.5
3.	Barugaya	425.0	1316.1	1741,1
4.	Tamalabba	504,0	1917,9	2421,9
	Jumlah	1379,7	8301,7	9681,4

: *Profil Desa Punaga Tahun 2017*

Tabel 6 menunjukkan bahwa luas lahan Desa Punaga seluas 9681,4 Ha. Luas lahan terbesar adalah lahan di Dusun Punaga yaitu 3888.9 Ha dan luas lahan terkecil adalah Dusun Malelaya yaitu 1629,5 Ha. Hal ini disebabkan karena Dusun Malelaya merupakan daerah pesisir dan sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai rumput laut dan kurangnya masyarakat yang bekerja sebagai petani.

6. Pemukiman dan Perumahan Penduduk

Pada umumnya bentuk rumah masyarakat Desa Punaga adalah berbentuk rumah panggung sebagian lainnya berbentuk rumah batu. Bentuk rumah pun di sesuaikan dengan strata sosial. Bentuk rumah karaeng keturunan Al-aidid sangat berbeda dengan non Al-aidid. Perbedaan utama ditandai dari bentuk atap dan jumlah tingkat yakni tiga tingkat bagi

keturunan Al-aidid. Desa Punaga terdapat pemukiman transmigrasi Punaga oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

B. Identitas Informan

Identitas Informan adalah gambaran kondisi atau keadaan serta status seseorang. Identitas Informan penting untuk diketahui agar dapat diketahui sudah berapa lama ia bekerja sebagai petani rumput laut sehingga dapat diketahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan petani rumput laut. Identitas Informan meliputi nama, jenis kelamin, alamat, umur, tingkat pendidikan, lama berusaha tani.

Tabel 7. Identitas Informan

No.	Nama	Jenis kelamin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan utama	Lama bekerja
1.	ST. Aisyah, S.P	P	45 Tahun	S1	Staff Dinas perikanan dan kelautan	15 Tahun
2.	Hendri	L	21 Tahun	SD	Petani rumput laut	10 tahun
3.	Sabang	L	30 Tahun	SD	Petani rumput laut	20 tahun
4.	Dg. Jarre	L	50 Tahun	SD	Petani rumput laut	20 tahun
5.	Arsyad Nanjeng	L	35 Tahun	SLTA	Petani rumput laut	10 tahun
6.	Muliadi Kahar	L	19 Tahun	SLTA	Petani rumput laut	15 tahun
7.	Dg. Bollo	L	45 Tahun	SLTP	Petani rumput laut	20 tahun
8.	Dg. Tola	L	49 Tahun	SD	Petani rumput laut	20 Tahun
9.	Winda	P	21 Tahun	SLTA	Petani rumput laut	2 tahun
10.	Ardi	L	21 Tahun	SD	Petani rumput laut	10 tahun
11.	Ferdinan Usman	L	30 Tahun	SD	Petani rumput laut	5 tahun

12.	Sa'dia	P	40 Tahun	SD	Petani rumput laut	20 tahun
11.	Dg. Ramang	L	35 Tahun	S1	Imam Desa Punaga	5 tahun
12.	Yusrifal Anwar	L	30 Tahun	S1	Sekretaris Desa	1 tahun

Sumber : Data Identitas Setelah Diolah, 2020

Tabel 7, menjelaskan tentang identitas Informan mulai dari nama, jenis kelamin, umur, tingkat sekolah, pekerjaan, dan lama bekerja. Satu diantara Informan merupakan Staff Dinas Peikanan dan Kelautan dan sebelas (11) responden merupakan petani rumput laut. Faktor usia merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan produktifnya seseorang dalam bekerja untuk memenuhi atau meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Tingkat umur Informan terbagi menjadi Umur >30 tahun sebanyak 6 orang, sedangkan umur <30 tahun sebanyak 6 orang. Pengalaman petani rumput laut dapat memberikan pengalaman, pengalaman itulah dapat menjadi guru atau petunjuk dalam melakukan kegiatan bertani rumput laut. Dari pengalaman yang lebih mapan petani dapat mengubah metodenya sehingga hasil kerja akan lebih produktif, adapun tingkat Lama bekerja Informan yakni 2-20 tahun, sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan petani rumput laut.

Sumber daya manusia yang diukur dari tingkat pendidikan merupakan faktor penting dalam mengakomodasikan teknologi maupun keterampilan dalam usaha budidaya rumput laut. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka pengetahuan atau informasi tentang usaha budidaya rumput laut semakin besar,

sehingga akan terpengaruh terhadap pengelolaan rumput laut. Tingkat pendidikan Informan dalam penelitian ini terbagi menjadi SD- Sederajat dan SLTP-Sederajat, SLTA-sederajat dan S1-sederajat.

C. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam meningkatkan Kesejahteraan petani rumput laut

Desa punaga merupakan sebuah desa yang terletak pada daerah pesisir Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar yang masyarakatnya banyak yang beraktivitas pada sektor perikanan dan kelautan khususnya di sektor pembudidayaan rumput laut. Desa Punaga dikenal sebagai sentra produksi rumput laut yang dimana ada satu dusun yaitu Dusun Malelaya yang hampir semua masyarakatnya bekerja sebagai petani rumput laut. Aktivitas bercocok tanam rumput laut dilakukan sepanjang tahun dengan siklus 30-45 hari sudah bisa lakukan proses panen.

Pembudayaan rumput laut yang dilakukan oleh masyarakat desa punaga mulai dari persiapan lahan hingga proses panen dilakukan secara tradisional.⁶¹dimana ilmu bercocok tanam didapatkan secara turun temurun dari nenek moyang mereka, ilmu ini yang terus menerus diterapkan hingga sekarang walaupun sebenarnya ada cara lebih mudah tetapi masyarakat setempat tidak mau mengambil resiko dalam proses bercocok tanam sehingga lebih memilih proses yang sudah lama dilakukannya.

⁶¹Muh ishak, “Upaya Perempuan pembudidaya rumput laut dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di desa pitu sunggu kecamatan ma’rang kabupaten pangkep”, (Skrripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Samata, 2019), hlm.22.

Rumput laut yang budidayakan oleh masyarakat Desa Punaga yaitu *SP* dan *Cattoni* dimana harga keduanya berbeda dikarenakan kualitas dimana harga dari *Cattoni* lebih mahal dari *SP*, rumput laut yang di hasilkan atau di jual oleh petani rumput laut merupakan Produk mentah yakni dijual dengan keadaan basah maupun kering, adapun harga rumput laut yang basah berda pada kisaran Rp. 17.000 perkilo sedangkan yang kering berada pada kisaran Rp. 23.000 perkilo maka karena hal ini masyarakat yang bermukim diDesa Punaga lebih memilih bekerja sebagai petani rumput laut karena harga yang menjanjikan.⁶² Alasan kenapa rumput laut bisa menjadi tumpuan harapan masyarakat pesisir di masa kini dan yang akan datang: pertama, berbagai jenis rumput laut potensial biasa dan relative mudah dibudidayakan karena teknologinya sederhana dan relative murah, tidak memerlukan pantih benih, tidak memerlukan pakan dalam pembudidayaannya tetapi cukup dengan kondisi kesuburuan perairan dan fotosintesis.⁶³

Masyarakat yang melakukan usaha rumput laut menjual ke pengepul baik yang ada didalam lingkup desa itu sendiri maupun pengepul dari luar yang masuk kedalam desa. Masyarakat menjual kepada pengepul dengan taksiran perkilo dalam keadaan kering, tetapi banyak juga pengepil yang membeli rumput laut pada Petani rumput laut dalam keadaan basah, jika permintaan pada

⁶²Hendra Petani rumput laut, wawancara di desa Punaga pada tanggal 2 Oktober 2020

⁶³Umalidi,"Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani rumput laut di kecamatan sinjai utara kabupaten sinjai (kelurahan lappa)"(Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Samata, 2014), hlm. 2.

pabrik sangat besar. Hasil bercocok tanam rumput laut di jual dalam keadaan mentah karena belum ada teknologi yang bisa membuat rumput laut menjadi produk yang bernilai ekonomis, padahal rumput laut memiliki kandungan gizi yang sangat banyak.⁶⁴ Pada masa sekarang kiat berada pada era digital dimana sistem pembayaran serta penjualan mestinta bisa dilakukan secara digital sehingga pembeli dan penjual tidak terbatas oleh ruang dan waktu.⁶⁵

Tetapi pada masa sekarang harga rumput laut yang menurun drastis disebabkan oleh efek Pandemi COVID-19 dimana awalnya harga rumput laut basah berada pada harga Rp.17.000 perkilo kini turun menjadi Rp.9.000 sedangkan rumput laut kering dari harga Rp.23.000 turun menjadi Rp. 13.000.

*“Kebanyakan masyarakat disini mengusahakan rumput laut, mempertahankan keberlangsungan hidup dengan tingginya kebutuhan rumah tangga sekarang, harga rumput laut berubah-ubah yang awalnya berada di harga Rp. 23.000 perkilo turun sampai Rp. 13.000 perkilo ini disebabkan karena pandemic Covid-19”.*⁶⁶ maka dari dampak tersebut petani rumput laut⁶⁷ banyak mengalami kerugian yang sangat besar dikarenakan harga bibit yang

⁶⁴Syarfaini Syarfaini,dkk,” Analisis Kandungan Zat Gizi Roti Rumput Laut Lawi-Lawi (Ceulerpa racemosa) Substitusi Tempe Sebagai Alternatif Perbaikan Gizi Masyarakat”, *al-sihah*,vol 11, Nomor 1(Januari-Juni 2019), hlm.1.

⁶⁵Munir Salim, “jual beli secara online menurut pandangan hukum islam”, *al-daulah*,vol 6, Nomor 2 (Desember 2017), hlm.371.

⁶⁶Ferdinan Usman, Petani rumput laut, wawancara di desa Punaga pada tanggal 2 Oktober 2020

⁶⁷Andi Samsir,” *analisis sektor potensial di wilayah telling pocco'e*” ACCES , Vol. 3, No. 1 (Juni 2016) h.11.

sangat tinggi sedangkan hasil penjualan yang sangat rendah. Selain dari permasalahan

tersebut terdapat kendala-kendala lain yang ditemui oleh para petani rumput laut seperti adanya hama pengrusak rumput laut yang disebabkan oleh Cuaca yang sering berubah-ubah, selain dari timbulnya hama cuaca juga mengakibatkan tidak stabilnya ombak pada pantai yang mengakibatkan bibit rumput laut terlepas pada tali bentangan. Bukan hanya itu saja yang menjadi permasalahan bagi petani rumput laut, permodalan merupakan masalah utama yang sering dihadapi oleh masyarakat yang sampai mengakibatkan banyak petani rumput laut gulung tikar.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Pemerintah daerah dalam hal ini dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan membuat bebaapa kebijakan terhadap petani rumput laut yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam dengan bentuk implementasi pemberian sarana dan prasaran penunjang bagi usaha tani rumput laut. Ada delapan kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Takalar untuk mendukung pengembangan rumput laut, yaitu: menyiapkan regulasi tentang pembudidayaan rumput laut dan tata ruang wilayah pesisir; menyediakan anggaran untuk membantu pengadaan dan pembaharuan peralatan usaha (teknologi budidaya); melakukan pembersihan kawasan pantai di seputar lokasi budidaya rumput laut secara berkala; membentuk Bumdes untuk budidaya dan pengolahan rumput laut di

setiap desa pesisir Kabupaten Takalar; Menyediakan prasarana dan sarana pendukung budidaya rumput laut; mendorong dilakukannya ekstensifikasi lahan yang sudah dimanfaatkan; mengintensifikan bimbingan dan penyuluhan pengelolaan budidaya rumput laut bagi masyarakat dan mempromosikan hasil produksi dari bahan dasar rumput laut.⁶⁸ Bukti nyata dari program tersebut yakni seperti pemberian tali, bibit rumput laut, gabus dan sampai dengan pemberian *speed boat* kepada petani rumput laut, bukan hanya itu pemberian pelatihan mengenai proses pembudidayaan rumput laut. Hal ini guna untuk menunjang upaya mengsejahterakan petani rumput laut berdasar dari 3 aspek yaitu modal, *skill* atau keterampilan, tingkat pendidikan formal, serta sarana dan prasarana produksi.⁶⁹

Pada proses pendistribusian sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan yang proses pendistribusiannya kurang merata sehingga ada beberapa petani yang tidak merasakan sarana dan prasarana dari pemerintah, dalam pendistribusian sarana dan prasarana yang di berikan kepada masyarakat, pemerintah harus melakukan pengawasan.⁷⁰

⁶⁸Muh yusri R, “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan petani rumput laut Desa laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Samata, 2016), hlm. 2.

⁶⁹Umar Sulaiman, ” Pola Kerjasama & Ketidakejahteraan Komunitas Petani Rumput Laut di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, *al-daulah*, vol 4, nomor , (Juni 2015), hlm.1.

⁷⁰St. Nurjannah,” *Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen “Ad-adulah*, Vol 1, No. 2,(Juni 2013), hlm.1

Pemerintah juga telah membuat kelompok tani dengan harapan terbentuknya kelompok tani ini akan menjadi penyambung tangan pemerintah dengan para petani rumput laut namun kenyataan di lapangan berbanding terbalik, dimana kelompok tani hanya sebatas nama atau struktur kepengurusan saja tanpa adanya aktivitas sebagaimana yang seharusnya.

Menanggapi persoalan petani rumput laut yang ada, tidak hanya pemerintah daerah yang turut andil terdapat juga peran pemerintah desa yang turut berkontribusi dalam upaya mensejahterakan petani rumput laut. Dalam peningkatan Kualitas Kesejahteraan Petani rumput laut, Pemerintah Desa Punaga juga menganggarkan bantuan bagi petani rumput laut guna menunjang Keberlangsungan proses bercocok tanam bagi petani.

*“Pemerintah Desa juga memberikan bantuan sarana dan prasana berupa alat penunjang bagi usaha tani rumput laut”.*⁷¹

Sebagai bentuk nyata dari upaya tersebut, pemerintah desa memberikan sarana dan prasarana penunjang usaha tani rumput laut, pemberian modal berupa uang tunai sampai dengan menjadi jembatan upaya perlindungan usaha tani dengan memberikan jalan tengah terbaik dikarenakan ketiadaan regulasi tentang pengaturan atau penghukuman pengerusakan usaha tani.

Masyarakat Desa Punaga sangat bersyukur dengan adanya campur tangan pemerintah dalam usaha Tani rumput laut yang digeluti masyarakat Desa

⁷¹Yusril Anwar, Sekretaris Desa Punaga, Wawancara dilakukan di kantor Desa Punaga pada tanggal 5 Oktober 2020

Punaga. Terselip harapan masyarakat kepada Pemerintah untuk peningkatan serata pengembangan usaha Tani Rumput laut guna peningkatan kualitas kesejahteraan bagi para petani rumput laut.

“Pelayanan pemerintah sangat bagus, pemberian bantuan dan sosialisasi tentang rumput laut, tetapi ada harapan kami kepada pemerintah yakni pengembangan dan peningkatan kesejahteraan petani rumput laut melalui program-program pemerintah”.³

Sama halnya dengan masyarakat lainnya yang meminta kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan para petani rumput laut hal ini dikarenakan mata pencaharian hanya pada hasil tani rumput laut. *“Tanggapan saya kepada pemerintah tidak ada tetapi kami menaruh harapan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan para petani rumput laut, mengingat Desa Punaga merupakan sentra rumput laut”.⁴*

Maka dari itu masyarakat menaruh harapan besar kepada Pemerintah Daerah dalam peningkatan kesejahteraan petani rumput laut, mengingat Desa Punaga merupakan sentra rumput laut yang terletak di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. Peran Pemerintah Daerah yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar sebagai pemerintah daerah yang

³Ardi, Petani rumput laut, Wawancara dilakukan di Desa Punaga pada tanggal 2 Oktober 2020

⁴Dg. Tulo, Petani rumput laut, Wawancara dilakukan di Desa Punaga pada tanggal 2 Oktober

menangani tentang rumput laut yakni penyediaan bantuan sarana dan prasarana kepada para petani rumput laut.

Adapun strategi pemerintah daerah untuk menungjang peningkatan kesejahteraan petani rumput laut yakni pemberian bantuan, berupa bimbingan teknis melalui sosialisasi kepada Petani rumput laut.

*“Peran dinas perikanan dan kelautan sebagai pemerintah daerah yaitu menyediakan bantuan sarana dan prasaran kepada Petani rumput laut”.*⁵

Hal tersebut sejalan dengan Bab II pasal 3 Point (a) Undang-undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. *“Menyedikan prasarana dan sarana dalam menegbangkan usaha”.*⁶

Amanat dari Undang-undang No. 7 Tahun 2016 sudah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar

*“Undang-undang No. 7 Tahun 2016 Tentang perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam telah kami realiasaikan sesaui dengan prosedur”.*⁷

Hal ini juga terbukti dari hasil wawancara langsung dengan petani rumput laut bahwa pemerintah sudah menjalankan Tugasnya hal ini didasari dengan

⁵ST. Aisyah, Staff Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar, Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Kelautan dan Peikanan Kabupaten Takalar pada 5 Oktober 2020

⁶Undang-undang RI No. 7 Tahun 2016 Tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, Bab II pasal 3 point (a)

⁷ST. Aisyah, Staff Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar, Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Kelautan dan Peikanan Kabupaten Takalar pada 5 Oktober 2020

terlaksananya pemberian sarana dan prasarana kepada petani rumput laut guna menunjang keberlangsungan Usaha Tani Rumput laut.

Walaupun pemenuhan terhadap penunangan Usaha Tani Rumput telah teralisasi perlunya regulasi tentang aturan (Perdes) mengenai pengawasan serta perlindungan bagi usaha tani yang dilakukan masyarakat yakni berupa pemberian denda bagi pelaku pengrusakan lahan serat rumput laut.

Regulasi terhadap perlingan bagi petani rumput laut belum ada, sehingga aturan yang di gunakan oleh pemerintah desa dalam penyelesaian perkara pengrusakan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah.

“ belum ada peraturan desa tentang pengaturan terhadap rumput laut atau pelaku pengrusakan lahan rumput laut”.⁸

Dalam penyelesain perkara pemerintah merujuk pada Undang-Undang yang berlaku, sehingga dalam proses mediasi yang di lakukan pemerintah daerah tidak ada masyarakat yang mengeluh serta membantah.

D. Pandangan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Peran Peran Pemrintah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Rumput laut

Makna dasar dari kata *siyasah* di simpulkan oleh Dr. Athiyah ‘Adlan Qarah adalah sebuah tindakan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan atau kewenangan.⁸ Inti dari tindakan tersebut yaitu memelihara, mengatur, dan mengupayakan tercapainya kebaikan. Metode dan

⁸Yusril Anwar, Sekretaris Desa Punaga, Wawancara 5 Oktober 2020

⁸Athiyah ‘Adlan Qarah, Al-Ahkam as-syar’iyyah lin-Nawazil As-Siyasiyyah, h.11

saran dalam menjalankan tindakan dan kebijakan tersebut bisa beragam, namun bertumpu pada kerja keras, menanggung kesukaran, dan menghancurkan segenap kesukaran yang ada, dan menghancurkan segenap kemampuan. Adapun tujuan akhir adalah untuk rakyat dan membuat urusan rakyat menjadi lebih baik.

Sejalan dengan pengertian dari siyasah syariah yakni kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengutamakan kemaslahatan ummat atau masyarakat, dalam hal ini pemerintah Daerah Kabupaten Takalar telah menunjukkan perannya sebagai pemerintah yakni memberikan sarana dan prasarana penunjang usaha tani bagi Petani rumput laut. Pada dasarnya inti dari Siyasah Syar'iyah adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa.⁷²

Dalam sejarah perjalanan Islam, dapat terlihat bahwa Islam pada masa Rasulullah menunjukkan berkembangnya peradaban dari semua sisi aspek kehidupan, karena Islam adalah agama yang rahmatan lil 'alamin. Sebagai agama yang dapat membawa kebaikan bagi semua makhluk. Dibandingkan perkembangan peradaban barat masa lalu, Islam memiliki banyak kelebihan dalam perkembangan peradaban. Dimulai dari berkembangnya ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu umat muslim dalam mengelola segala urusan kehidupannya.

⁷²Indo Esse., Lomba Sultan “*sistem pemerintahan kerajaan wajo di desa tosora abad xv-xvii perspektif siyasah syar'iyah*”. Siyasatuna, Volume 3 Nomor 1 (Januari 2021), h.100.

Peradaban yang ada pada zaman keemasan Islam seharusnya bisa dijadikan contoh pada saat sekarang, yang di mana saat ini umat muslim mengalami keterpurukan dari banyak hal dalam kehidupan. Salah satu hal penting yang masuk dalam pemenuhan hajat umat muslim yakni pertanian. Dalam hal ini, pertanian memiliki peran yang penting dan utama untuk diurus dalam mendukung sektor kehidupan lainnya. Zaman keemasan Islam telah menunjukkan perkembangan sektor pertanian dalam ilmu pengetahuannya yang pesat dan maju.

Pertanian dalam peradaban adalah memahami hakikat bidang ilmu di sektor pertanian yang luas. Pertanian dalam arti sempit adalah berkaitan dengan bercocok tanam. Namun di sisi lain, ia juga memiliki makna dalam ruang lingkup yang luas yang mencakup bidang pertanian itu sendiri, kemudian bidang perikanan, bidang peternakan, bidang perkebunan dan bidang kehutanan.⁷³ Agama Islam merupakan salah satu diantara beberapa agama Samawi. Allah menyampaikan Syariat Islam melalui perantara Rasulullah-Nya. Ajarannya membimbing umat agar selamat di dunia dan di akhirat dengan kehidupan yang seimbang antara keduanya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Allah membekali Nabi Muhammad sebagai Rasul dengan kitab suci al-Quran. Firman Allah Swt: *“Al Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagikaum yang meyakini”*. (Q.S. al-Jatsiyah [45]: 20)

⁷³Kusmiadi E, Pengertian dan Sejarah Perkembangan Pertanian, dalam Pangaribuan N dan Kusmiadi E. Pengantar Ilmu Pertanian (Tangerang: Universitas Terbuka, 2014), h.14

Dijelaskan dalam surah Al-Nisa 4:59 mengenai ketaan kepada pemerintah, yang dimana Masyarakat harus taat kepada pemerintah selama pemimpin masih pergelut di jalan Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁷⁴

Adapun sebab diturunkannya surah Al-Nisa 4:59 yakni Ketika Abdullah bin Hudzafah bin Qais, ketika ia diutus oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk memimpin suatu pasukan khusus. Abdullah memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan kayu bakar dan membakarnya. Ketika api sudah menyala, ia menyuruh pasukannya untuk memasuki api itu. Lalu salah seorang pasukan menjawab, “ *sesungguhnya jalan keluar dari api ini hanya Rasulullah. Jangan tergesa-gesa sebelum menemui Rasulullah. Jika Rasulullah memerintahkan kalian untuk masuk api itu, maka masukilah.*” Lantas mereka menghadap Rasulullah dan menceritakan hal itu. Rasulullah melarang memasuki api itu dan menegaskan bahwa ketaatan hanya dalam kebaikan. Ibnu Hajar Al Asqalani menjelaskan surat An Nisa ayat 59 turun berkenaan dengan

⁷⁴Departemen Agama RI. *ALWASIM Al-Qur'an tajwid kode, transliterasi perkata dan terjemahan perkata* (Jawa Barat: Cipta Bagus segara.2013),h.88.

hal ini, menjelaskan bahwa jika ada perbedaan dan suatu masalah maka harus dikembalikan kepada al Quran dan Hadis.⁷⁵

Ayat ini memerintahkan agar kaum Muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, hendaklah kaum Muslimin:

- a. Taat dan patuh kepada perintah Allah dengan mengamalkan isi Kitab suci Al-Qur'an, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya, sekalipun dirasa berat, tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak pribadi. Sebenarnya segala yang diperintahkan Allah itu mengandung maslahat dan apa yang dilarang-Nya mengandung mudarat.
- b. Melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah saw pembawa amanat dari Allah untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-Nya. Dia ditugaskan untuk menjelaskan kepada manusia isi Al-Qur'an. Allah berfirman: "... Dan Kami turunkan Adz-dzikir (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka !." (an-Nahl/16:44).
- c. Patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Apabila mereka

⁷⁵Departemen Agama RI. *ALWASIM Al-Qur'an tajwid kode, Asbabun Nusul transletirasi perkata dan terjemahan perkata* (Jawa Barat: Cipta Bagus segara.2013),h.89.

telah sepakat dalam suatu hal, maka kaum Muslimin berkewajiban melaksanakannya dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan Kitab Al-Qur'an dan hadis. Kalau tidak demikian halnya, maka kita tidak wajib melaksanakannya, bahkan wajib menentangnya, karena tidak dibenarkan seseorang itu taat dan patuh kepada sesuatu yang merupakan dosa dan maksiat pada Allah. Nabi Muhammad saw bersabda: "Tidak (dibenarkan) taat kepada makhluk di dalam hal-hal yang merupakan maksiat kepada Khalik (Allah swt)." (Riwayat Ahmad). d.Kalau ada sesuatu yang diperselisihkan dan tidak tercapai kata sepakat, maka wajib dikembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Kalau tidak terdapat di dalamnya haruslah disesuaikan dengan (dikiaskan kepada) hal-hal yang ada persamaan dan persesuaiannya di dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Tentunya yang dapat melakukan kias seperti yang dimaksud di atas ialah orang-orang yang berilmu pengetahuan, mengetahui dan memahami isi Al-Qur'an dan sunah Rasul. Demikianlah hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Selain dari kebijakan pemerintah tentang pemberian sarana dan prasarana penunjang, pemerintah desa juga berperan aktif dalam penunjang usaha tani guna meningkatkan kesejahteraan Petani Rumpun Laut. Pemerintah desa dalam penanganan atau penyelesaian permasalahan mengenai pengrusakan usaha tani dilakukan dengan proses mediasi bagi kedua belah pihak.

Dengan *siyasah syar'iyah*, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kewenangan segala bidang yang mengandung kemaslahatan Ummat, baik itu di bidang politik, ekonomi dan hukum. Secara terperinci Imam *al-mawardi* menyebutkan bahwa diantara yang termasuk kedalam hukum kekuasaan dan kewenangan *siyasah syar'iyah* sekurang-kurang mencakup dua puluh bidang, yaitu: *'Aqdul Imamah* (keharusan dan tatacara kepemimpinan dalam islam yang mengacu pada *syura Taqlidul Wizarah* (pengangkatan pejabat menteri yang mengandung dua pola yaitu *wizarah tafwidhiy* dan *wizarah tanfidziyah*, *Taqlidul imarah 'alal bilad*, pengangkatan pejabat Negara seperti gubernur, wali Negeri, atau kepala daerah dan sebagainya. Wilayah *'ala hurubil mashalih*, yaitu kewenangan untuk memerangi para pemberontak. *Wilayatul qadha*, kewenangan dalam menetapkan para pemimpin pengadilan, Para *qadhi*, hakim dan sebagainya. *Wilayatul madhalim*, kewenangan memutuskan persengketaan diantara rakyatnya baik secara langsung atau menunjuka pejabat tertentu. *Wilayatun niqobah*, kewenangan menyensus penduduk, mendata dan mencatat nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya. Wilayah *'ala imamatis shalawat*, kewenangan mengimani shalat baik secara langsung atau mengangkay wilayah *fi ahkam hisbah*, kewenangan dalam menetapkan lembaga pengawasan.

Berdasarkan dari penjelasan mengenai *siyasah syar'iyah* pemerintah sebagai wakil rakyat diharuskan berlakuk adil dan trasnparan dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan yang menyangkut kemaslahatan ummat. Jika ada perselisihan antara pemerintah dan masyarakat maka pemutusnya dikembalikan pada Al-Qur'an dan As sunnah.

Petani Rumput laut dalam melakukan usaha taninya tidak pernah melupakan hak dan kewajibannya sebagai Ummat Muslim. maka setiap akan masuk pada

waktu Shalat, Para Petani Rumput laut yang sedang mengurus usaha Taninya bergegas untuk mempersiapkan diri menuju ke masjid guna melaksanakan Shalat Secara Berjamaah. Sejalan dengan ungkapan yang dikemukakan oleh Imam Desa Punaga.

*“petani rumput laut tidak pernah meninggalkan kewajibannya sebagai ummat islam yakni Shalat lima waktu terkhusus pada hari jumat, para laki-laki yang berprofesi sebagai petani rumput laut ketika hampir mendekat waktu shalat jumat mereka sudah bergegas pulang kerumah untuk bersiap-siap ke masjid melaksanakan shalat jumat”.*⁹ Melihat ungkapan yang dipaparkan oleh imam Desa Punaga petani rumput selalu menjalankan tugasnya sebagai umat Muslim dan juga sebagai kepala rumah tangga serta sebagai petani rumput laut.

⁹Dg.Ramang, Imam Desa Punaga, Wawancara 5 Oktober 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian serta analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam meningkatkan Kesejahteraan petani rumput laut

Pemerintah daerah Telah melaksanakan perannya dalam peningkatan kesejahteraan Petani Rumput laut, namu pemberian yang dilakukan secara bertahab sehingga maysrakat merasa penyaluran tidak merata.

2. pandangan Siyasah Syar'iyah Terhadap Peran Pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan Petani rumput laut di Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar

Pemerintah merupakan tombak penegak kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga peran Pemerintah sangat dibutuhkan dalam perubahan masyarakat Desa Punaga. Siyasah Syar'iyah memandang bahwa kepala daerah sebisa mungkin mengayomi masyarkat dan mensejahterakan rakyat. Sebagai pemerintah yang baik maka sudah seharusnya untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakatnya.

B. Saran / Implikasi Penelitian

Bertolak dari temuan penelitian tentang Peran Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Rumput Laut dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah maka perlu disempurnakan dan dilakukan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bentuk pengawasan oleh pemerintah Daerah harus diperketat dalam penyaluran bantuan serta sosialisasi terhadap Masyarakat
2. Masyarakat yang mendapatkan kejanggalaan terhadap penyaluran agar segera melaporkan kepada yang berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- al-Asfahani Al-Ragib, *Mu'jam Mufradat alFaz al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fakr,t.th)
- Al-Khalia Abd bin Al-Rahman Abd. *Al-Wishova Al- 'Ashr lil 'Amilin bi Al-Da'wah ilallah Subhanahu wa Ta'ala*. Kuwait: Jam'iyah Ihya Turats Al-Islami, Cet. I 1408H/1988H
- Al-Maraghi Mustafa Ahmad. *Tafsir Al-Maraghi*, (Lebanon, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Jilid 3, Edisi II, 2016
- Ambrusi Fahmi, *Hukum Pemerintah Daerah* , (Bandung: Nusamedia, 2012)
- B.A Fanany Umar, dengan judul *Problema Kemiskinan Apa Konsep Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, Cet. II, 1982,
- Badan Pusat Statistik, *Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 2015*, (Jakarta: BPS, 2016)
- Badawi Zaki Ahmad. *Mu'jam Mushthalahâtu al-'Ulûm al-Ijtimâ'iyah*, (Beirut, Maktabah Lubnan: New Impression 1982)
- Basri Abidin Ikhwan, *Islam dan Pmebangun Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2005)
- Depertemen Agama RI. *ALWASIM Al-Qur'an tajwid kode, transletirasi perkata dan terjemahan perkata* (Jawa Barat: Cipta Bagus segara.2013)
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi V (cet. I; Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukaan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Repoblik Indonesia, 2016)*
- Imam Abi Fadl Jamal al-Din Muhammad Ibnu Manzur al-Ansari Imam Abi Fadl Jamal al-Din Muhammad Ibnu Mukarram Ibnu Manzur al-Ansari, *Lisan al-'Arab*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1992)
- Ishak Muh, "Upaya Perempuan pembudidaya rumput laut dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di desa pitu sunggu kecamatan ma'rang kabupaten pangkep", (Skrpisi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Samata, 2019).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Ismail Usman Asep, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*
- Kencana syafii Inu, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Refika Aditama, 2010)

- Kurniawan Rendra dan Mulawarman Aji Dedi, *Inspirasi dari Ladang: Akuntansi Pertanian Nusantara*, (Jakarta: yayasan Rumah Peneleh, 2016)
- Marbun .SF, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997)
- Muh yusri R, “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan petani rumput laut Desa laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Samata, 2016).
- Muhadjir Neong, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, Teori Pendidikan Perilaku Sosial Kreatif* . (Yogyakarta : Raka Sarasin. 2000)
- Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Qarah ‘Adlan Athiyah, *Al-Ahkam as-syar’iyyah lin-Nawazil As-Siyasah*
- Retnawati Setya, *Sistem Pemerintahan Daerah DiIndonesia*, (Jakarta: Kantor Mentri Negara Otonomi Daerah Repoblik Indonesia, 2001)
- Setya Nugraha G, F. Maulana R., *Kamus Besar Bahasa indonesia*, Surabaya
- Shihab M.Quraish, *Wawasan Al-Qur’an* , (Mizan: Bandung, 2001)
- Shihab Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*(Jakarta, Lentera hati, Volume V, Cet.V, 2012
- Soekanto Soerjono, *sosiologi suatu pengantar* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet.II; Bandung: Alfabeta, 2014)
- Tamboto Hendri J.D. dan A.Ch.Mandagi Allen, *Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pasisir Berbasis Literasi Ekonomi dan Modal Sosial*, (Malang: CV.Seribu Bintang, 2019)
- Umalidi,”Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani rumput laut di kecamatan sinjai utara kabupaten sinjai (kelurahan lappa)”(Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Samata, 2014),
- Wirutomo Paulus, *pokok-poko pikiran dalam sosiologi David Berry* (Jakarta : PT. Raja Geravindo Persada, 2003)
- Zuhaily Wahbah. “*Ushul Fiqh*” *Kulliyat da’wah al Islami* (Jakarta : Radar Jaya Pratama, 1997)

Jurnal

- AP Idham Andi,” *pemanfaatan lahan kawasan pesisir galesong berbasis analisis resiko bencana abrasi*”, Plano Madani, Vol. 4, Nomor. 2 (Januari 2015).
- Astika Budi, *Gambaran Konsep Sejahtera pada Lansia di Kelurahan Sumbermulyo, Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Jurusan Psikologi, 2010)
- Azizah Erma Ayi, “*konsep Al-Qur’an tentang kesejahteraan sosial (Studi Tafsir Tematik)*”, Skripsi (Bantaeng : Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2016)
- Bariun La Ode, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang Berkeadilan*, (Disertasi Universitas Hasanuddin Makassar, 2015)
- Esse Indo., Sultan Lomba “*sistem pemerintahan kerajaan wajo di desa tosora abad xv-xvii perspektif siyasah syar’iyyah*”. Siyasatuna, Volume 3 Nomor 1 (Januari 2021).
- Hamzah. “*Konflik dan Ketegangan Dalam Hukum Islam Antara Stabilitas dan Perubahan*”. Ad-daulah. Vol. 4 No. 2, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2015.
- Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah abad Terakhir*, (Yogyakarta: ISEI, 2005)
- Kurniati. “*Nepotisme dalam Perspektif Hadis (Kritik sanad dan matan Hadis)*”. al-daulah. Vol. 4 No. 1, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2015.
- M. Hdjon Philipus, *Penataan Hukum Administrasi*, (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1998)
- Munir Salim, “*jual beli secara online menurut pandangan hukum islam*”, al-daulah, vol 6, Nomor 2 (Desember 2017).
- Mustafa Adriana, “*evektivitas perjanjian laut antara anak buah kapal menurut undang-undang nomor 17 tahun 2008*”, al-daulah Vol.5. No. 2, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2015.
- Nurwahyuni, *Hukum Adaministrasi Daerah*, (Bandarlampung, Universitas Lampung, 2009)

Rusydi Ulum Bahrul.dkk,” *peran modal manusia terhadap upah pekerja di kota makassar*”, Bulletin of Economic Studies (BEST), Vol. 1, Nomor 1, (Februari 2021).

Samsir Andi,” *analisis sektor potensial di wilayah telling pocco’e*” ACCES , Vol. 3, No. 1 (Juni 2016).

St. Nurjannah,” *Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen “Ad-adulah, Vol 1, No. 2,(Juni 2013).*

Syarfaini Syarfaini,dkk,” Analisis Kandungan Zat Gizi Roti Rumput Laut Lawi-Lawi (*Ceulepa racemosa*) Substitusi Tempe Sebagai Alternatif Perbaikan Gizi Masyarakat”, *al-sihah,vol 11, Nomor 1(Januari-Juni 2019)*

Umar Sulaiman,” Pola Kerjasama & Ketidaksejahteraan Komunitas Petani Rumput Laut di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, *al-daulah,vol 4, nomor , (Juni 2015).*

Usman Jafar, “*Kekuasaan dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi atas Pemikiran Politik Islam”)*”. Ad-daulah. Vol. 6 No. 2, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2017.

Undang-undang

Republik Indonesia, *Undang- undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam.*

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah.*

ALA UDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar : 1

Wawancara dengan Staff Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar



Gambar : 2

Wawancara dengan Petani Rumput Laut



Gambar : 3

Wawancara dengan Petani Rumput laut



Gambar : 4

Wawancara dengan Petani Rumput Laut



Gambar : 5

Wawancara dengan Petani Rumput laut



Gambar : 6

Wawancara dengan Petani Rumput laut



Gambar : 7

Wawancara dengan Petani Rumput Laut



Gambar : 8

Wawancara dengan Petani Rumput Laut



Gambar : 9

Penjemuran Rumput Laut



Gambar : 10

Wawancara dengan Sekretaris Desa Punaga



Gambar : 11

Wawancara dengan Imam Desa Punaga



Gambar : 12

Lahan Budidaya Rumput Laut

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ST. AISYAH S.P
Jabatan/Pekerjaan : Staf Diknas Perikanan dan Kelautan KAB. Takalar
Alamat : 2L-Fitra No. 12

Telah Menjadi Narasumber dalam penelitian Skripsi dengan judul " Peran Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Rumput Laut Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2016 dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus Desa. Punaga, Kecamatan. Mangarabombang, Kabupaten Takalar)"

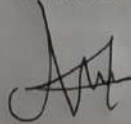
Dengan Saudara :

Nama : Muh. Agus Mallarangang
NIM : 10200117021
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian Surat ini di buat untuk digunakan sebagai Bukti Wawancara agar dapat digunakan Sebagaimana mestinya.

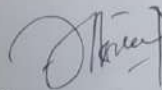
Punaga, 2 Oktober
2020

Mahawisiwa



(Muh. Agus Mallarangang)

Narasumber



ST. AISYAH S.P.

(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SA' DIA

Jabatan/Pekerjaan : Petani RUMPUT LAUT

Alamat : DESA ~~TAHANG~~ PUNAGA

Telah Menjadi Narasumber dalam penelitian Skripsi dengan judul " Peran Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Rumput Laut Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2016 dalam Perspektif Siyash Syar'iyah (Studi Kasus Desa. Punaga, Kecamatan. Mangarabombang, Kabupaten Takalar)"

Dengan Saudara :

Nama : Muh. Agus Mallarangang

NIM : 10200117021

Semester : VII (Tujuh)

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian Surat ini di buat untuk digunakan sebagai Bukti Wawancara agar dapat digunakan Sebagaimana mestinya.

Punaga, 2 Oktober
2020

Mahawisiwa

Narasumber



(Muh. Agus Mallarangang)



(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARDI

Jabatan/Pekerjaan : PETANI RUMPUT LAUT

Alamat : DESA PUNAGA

Telah Menjadi Narasumber dalam penelitian Skripsi dengan judul " Peran Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Rumput Laut Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2016 dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus Desa. Punaga, Kecamatan. Mangarabombang, Kabupaten Takalar)"

Dengan Saudara :

Nama : Muh. Agus Mallarangang

NIM : 10200117021

Semester : VII (Tujuh)

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian Surat ini di buat untuk digunakan sebagai Bukti Wawancara agar dapat digunakan Sebagaimana mestinya.

Punaga, 2 Oktober
2020

Mahawisiwa



(Muh. Agus Mallarangang)

Narasumber



(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARSAD NAKJENG
Jabatan/Pekerjaan : PETANI RUMPUT LAUT
Alamat : DESA PUNAGA

Telah Menjadi Narasumber dalam penelitian Skripsi dengan judul " Peran Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Rumput Laut Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2016 dalam Perspektif Siyash Syar'iyah (Studi Kasus Desa. Punaga, Kecamatan. Mangarabombang, Kabupaten Takalar)"

Dengan Saudara :


Nama : Muh. Agus Mallarangang
NIM : 10200117021
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian Surat ini di buat untuk digunakan sebagai Bukti Wawancara agar dapat digunakan Sebagaimana mestinya.

Punaga, 2 Oktober
2020

Mahawisiwa

Narasumber


(Muh. Agus Mallarangang)


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ~~Henri~~ HENRI
Jabatan/Pekerjaan : PETANI RUMPUT LAUT
Alamat : DESA PUNAGA

Telah Menjadi Narasumber dalam penelitian Skripsi dengan judul " Peran Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Rumput Laut Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2016 dalam Perspektif Siyash Syar'iyah (Studi Kasus Desa. Punaga, Kecamatan. Mangarabombang, Kabupaten Takalar)"

Dengan Saudara :

Nama : Muh. Agus Mallarangang
NIM : 10200117021
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian Surat ini di buat untuk digunakan sebagai Bukti Wawancara agar dapat digunakan Sebagaimana mestinya.

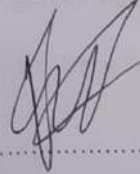
Punaga, 2 Oktober
2020

Mahawisiwa



(Muh. Agus Mallarangang)

Narasumber



(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DE- BILLO
Jabatan/Pekerjaan : PETANI RUMPUT LAUT
Alamat : DESA PUNAGA

Telah Menjadi Narasumber dalam penelitian Skripsi dengan judul " Peran Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Rumput Laut Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2016 dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus Desa. Punaga, Kecamatan. Mangarabombang, Kabupaten Takalar)"

Dengan Saudara :


Nama : Muh. Agus Mallarangang
NIM : 10200117021
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Demikian Surat ini di buat untuk digunakan sebagai Bukti Wawancara agar dapat digunakan Sebagaimana mestinya.

Punaga, 2 Oktober
2020

Mahawisiwa

Narasumber


(Muh. Agus Mallarangang)


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MULIARDI KAHAR
Jabatan/Pekerjaan : PETANI RUMPUT LAUT
Alamat : DESA PUNAGA

Telah Menjadi Narasumber dalam penelitian Skripsi dengan judul " Peran Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Rumput Laut Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2016 dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah (Studi Kasus Desa. Punaga, Kecamatan. Mangarabombang, Kabupaten Takalar)"

Dengan Saudara :


Nama : Muh. Agus Mallarangang
NIM : 10200117021
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Demikian Surat ini di buat untuk digunakan sebagai Bukti Wawancara agar dapat digunakan Sebagaimana mestinya.

Punaga, 2 Oktober
2020

Narasumber

Mahawisiwa


(Muh. Agus Mallarangang)


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DG. Tuo
Jabatan/Pekerjaan : PETANI RUMPUT LAUT
Alamat : DESA PUNAGA

Telah Menjadi Narasumber dalam penelitian Skripsi dengan judul " Peran Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Rumput Laut Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2016 dalam Perspektif Siyash Syar'iyah (Studi Kasus Desa. Punaga, Kecamatan. Mangarabombang, Kabupaten Takalar)"


Dengan Saudara :

Nama : Muh. Agus Mallarangang
NIM : 10200117021
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian Surat ini di buat untuk digunakan sebagai Bukti Wawancara agar dapat digunakan Sebagaimana mestinya.

Punaga, 2 Oktober
2020

Mahawisiwa



(Muh. Agus Mallarangang)

Narasumber



(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WINDA
Jabatan/Pekerjaan : PETANI RUMPUT LAUT
Alamat : DESA PUNAGA

Telah Menjadi Narasumber dalam penelitian Skripsi dengan judul " Peran Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Rumput Laut Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2016 dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus Desa. Punaga, Kecamatan. Mangarabombang, Kabupaten Takalar)"

Dengan Saudara :

Nama : Muh. Agus Mallarangang
NIM : 10200117021
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum


Demikian Surat ini di buat untuk digunakan sebagai Bukti Wawancara agar dapat digunakan Sebagaimana mestinya.

Punaga, 2 Oktober
2020

Mahawisiwa

Narasumber

(Muh. Agus Mallarangang)

()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SABANG

Jabatan/Pekerjaan : PETANI RUMPUT LAUT

Alamat : DESA PUNAGA

Telah Menjadi Narasumber dalam penelitian Skripsi dengan judul " Peran Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Rumput Laut Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2016 dalam Perspektif Siyash Syar'iyah (Studi Kasus Desa. Punaga, Kecamatan. Mangarabombang, Kabupaten Takalar)"

Dengan Saudara :

Nama : Muh. Agus Mallarangang

NIM : 10200117021

Semester : VII (Tujuh)

Jurusan : Hukum Tata Negara


Fakultas : Syariah dan Hukum

Demikian Surat ini di buat untuk digunakan sebagai Bukti Wawancara agar dapat digunakan Sebagaimana mestinya.

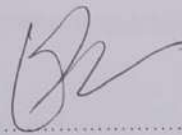
Punaga, 2 Oktober
2020

Narasumber

Mahawisiwa



(Muh. Agus Mallarangang)



(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MULIARDI KAHAR
Jabatan/Pekerjaan : PETANI RUMPUT LAUT
Alamat : DESA PUNAGA

Telah Menjadi Narasumber dalam penelitian Skripsi dengan judul " Peran Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Rumput Laut Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2016 dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah (Studi Kasus Desa. Punaga, Kecamatan. Mangarabombang, Kabupaten Takalar)"

Dengan Saudara :


Nama : Muh. Agus Mallarangang
NIM : 10200117021
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Demikian Surat ini di buat untuk digunakan sebagai Bukti Wawancara agar dapat digunakan Sebagaimana mestinya.

Punaga, 2 Oktober
2020

Narasumber

Mahawisiwa


(Muh. Agus Mallarangang)


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FERDINAN USMAN
Jabatan/Pekerjaan : PETANI RUMPUT LAUT
Alamat : DESA PUNAGA

Telah Menjadi Narasumber dalam penelitian Skripsi dengan judul " Peran Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Rumput Laut Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2016 dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah (Studi Kasus Desa. Punaga, Kecamatan. Mangarabombang, Kabupaten Takalar)"

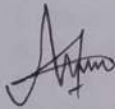
Dengan Saudara :

Nama : Muh. Agus Mallarangang
NIM : 10200117021
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Demikian Surat ini di buat untuk digunakan sebagai Bukti Wawancara agar dapat digunakan Sebagaimana mestinya.

Punaga, 2 Oktober
2020

Mahawisiwa



(Muh. Agus Mallarangang)

Narasumber



(.....).

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor: /HTN/2020

Judul Skripsi: Peran Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Rumput Laut Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2016 Dalam Perspektif Siyasah syar'iyah (Studi kasus Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar).

Gowa, 18 September 2020
Penyusun,


Muh. Agus Mallaahang
Nim. 10200117021

Pembimbing I



Prof. Dr. Usman, MA
Nip. 195809011991021001

Pembimbing II

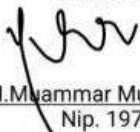


Dr. Hamzah Hasan, M. Hi
Nip. 196312311993021003

Diketahui Oleh:
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)


Dr. Kurniati, S.Ag., M.H.I
Nip. 19740627 200604 2 002

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar


Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag
Nip. 19731122 200012 1 002

M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No.63 Telp. (0411) 864928-864930 Fax: 864923

Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa Telp. 0411-841879, Fax: 0411-82211400

Nomor : B-3076/SH.01/PP.00.9/09/2020

Romang Polong, 24 September 2020

Sifat : Penting

Lamp. : Proposal

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth :

Dinas Penanaman Modal Daerah
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Prov. Sul-Sel
di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut
di bawah ini :

Nama : Muh. Agus Mallarangang
Nim : 10200117021
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan/prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Takalar

Bermaksud melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana, dengan judul skripsi :

*" Peran Pemerintah Daerah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Rumput Laut
Berdasarkan UU No.7 Tahun 2016 dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah
(Studi Kasus Desa Punaga , Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar) "*

Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Usman, M.A.
2. Dr. Hamzah Hasan, M.H.I.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin
untuk melakukan penelitian di Desa Punaga, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar, terhitung mulai
tanggal 24 September 2020 s.d. 24 Oktober 2020.

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak diucapkan terima kasih.



Tembusan:

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Romang Polong Gowa
(Sebagai Laporan).



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN MANGARABOMBANG
KANTOR DESA PUNAGA**

Alamat : Jl. Poros Malelaya Desa Punaga Kec. Mangarabombang Kode Pos 92261

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 1234 / DP-SKU / X / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini AN, Kepala Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, menerangkan bahwa :

N a m a	: MUH. AGUS MALLARANGANG
Nim	: 10200117021
Jurusan	: Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Program	: S1 Sarjana Hukum
Judul Skripsi	: Peran Pemerintah Daerah Terhadap peningkatan Kesejahteraan Petani Rumput Laut Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2016 dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar)

Mahasiswa tersebut diatas, telah melaksanakan penelitian di Desa Punaga Dari Tanggal 29 September s/d 20 Oktober 2020

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan sebagaimana semestinya.

Takalar, 20 Oktober 2020
AN, Kepala Desa Punaga
Sekretaris Desa

YUS RIVAL ANWAR S.Pt





PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Jenderal Sudirman No.28 Telp. (0418) 323291 Kab. Takalar

Takalar, 29 September 2020

Nomor : 306/IP-DPMPTSP/IX/2020
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a,
Yth. Kepala Desa Punaga
Di-
Takalar

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sul-Sel nomor : 6589/S.01/PTSP/2020, tanggal 24 September 2020, perihal Izin Penelitian, dan Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Nomor 070/306/KKBP/2020 tanggal 29 September 2020, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama	: MUH. AGUS MALLARANGANG
Tempat Tanggal Lahir	: Takalar, 16 Agustus 1999
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1) UIN Alauddin Makassar
Alamat	: Moncongkomba Kec. Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di kantor/instansi/wilayah kerja Bapak/Ibu dalam Rangka Penyusunan *Skripsi* dengan judul :

**"PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PETANI RUMPUT LAUT BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 2016 DALAM
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'ITYAH (STUDI KASUS DESA PUNAGA, KECAMATAN
MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR) "**

Yang akan dilaksanakan : Tgl. 24 September s/d 30 Oktober 2020
Pengikut / Peserta : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar ;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat ;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil *Skripsi* kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar ;
5. Surat pemberitahuan penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan seperlunya.

Kepala Dinas

DWI IWAN YUNES
Panglima Pembina Utama Muda
19620820 198302 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Takalar di Takalar (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Takalar di Takalar;
3. Kepala Bapelitbang Kab. Takalar di Takalar;
4. Camat Mangarabombang di Takalar;
5. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;
6. Peringgal



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 6589/S.01/PTSP/2020
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
Bupati Takalar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : B-3076/SH.01/PP.00.9/09/2020 tanggal 24 September 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MUH. AGUS MALLARANGANG**
Nomor Pokok : 10200117021
Program Studi : Hukum Tata Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 63 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI RUMPUT LAUT BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYARIYYAH (STUDI KASUS DESA PUNAGA KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **24 September s/d 30 Oktober 2020**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 24 September 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADIN NAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Penerima.

SIMAP PTSP 24-09-2020



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan wawancara Penelitian Skripsi “PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI RUMPUT LAUT DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYAH

(Studi Kasus Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar)”

No. Urut Kuesioner :

Hari/Tanggal :

Kontak/Hp :

Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin : a. Laki-laki
b. Perempuan
4. Alamat Tempat Tinggal :
5. Pendidikan terakhir :
6. Pekerjaan :
7. Lama Bekerja : a. < 1 tahun b. 1-10 tahun c. >10 tahun

1. Peran Pemerintah Daerah Untuk Kesejahteraan Petani Rumput Laut Berdasarkan UU NO.7 TAHUN 2016 :

Untuk Petani Rumput Laut :

1. Mengapa anda memilih bekerja sebagai petani rumput laut dibandingkan dengan pekerjaan lainnya?
2. Dimana anda belajar bertani rumput laut?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti kursus keterampilan?

4. Dimana anda menjual hasil rumput laut?
5. Berapa harga jual rumput laut?
6. Bagaimana bentuk penjualan rumput laut?
7. Apa yang menjadi kendala, selama menjalankan usaha rumput laut?
8. Apakah pernah diadakan penyuluhan atau pelatihan tentang tatacara bertani rumput laut yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah?
9. Apakah ada bantuan pemerintah selama melakukan budidaya rumput laut?
10. Jika ada, berupa bantuan seperti apa ?
11. Bagaimana bentuk penyaluran bantuan ke petani rumput laut?
12. Apakah anda memiliki kelompok tani atau kelompok lainnya dalam mengusahakan rumput laut?
13. Menurut anda hal-hal apa yang harus di perhatikan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani rumput laut?
14. apakah anda tahu tentang **UU NO. 7 Tahun 2016** tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam? (jika tidak peneliti menjelaskan tentang uu.7 tahun 2016 kepada Informan)
15. Bagaimana Menurut Bapak Tentang **UU No. 7 Tahun 2016** Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam?
16. Selain menjadi Petani Rumput Laut, apa pekerjaan sampingan bapak?
17. Bagaimana Tanggapan Anda Sebagai Seorang Petani Rumput Laut Terhadap Perhatian Pemerintah Kepada dalam Pembudidayaan Rumput Laut?

Untuk Pemerintah Daerah (Dinas Perikanan dan kelautan kab. Takalar) :

1. Bagaimana Peran Dinas Perikanan dan kelautan Selaku Pemerintah Daerah terhadap Peningkatan kesejahteraan petani rumput laut?
2. Strategi apa yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan kesejahteraan petani rumput laut?

3. Apa Kontribusi Pemerintah Daerah selama ini kepada Petani Rumput Laut?
4. Apakah UU No.7 Tahun 2016 Tentang perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak garam sudah terealisasi pada petani Rumput laut?

Untuk Pemerintah Desa Punaga

1. Bagaimana peran pemerintah desa selama ini terhadap peningkatan kesejahteraan petani rumput laut?
 2. Apakah pemerintah desa sudah memiliki regulasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani rumput laut?
- 2. Pandangan Siyasah Syar'iyah Terhadap Peningkatan kesejahteraan petani rumput laut Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2016**

Untuk Imam Desa Punaga

1. bagaimana aktifitas petani rumput laut pada saat waktu sudah memasuki waktu shalat?
 2. Bagaimana masyarakat desa punaga membina sikap gotong royong sesama petani rumput laut?
 3. Bagaimana pendapat bapak mengenai usaha rumput laut yang di jalankan saat ini oleh para petani, apakah tidak menyalahi aturan agama?
- Menggunakan kajian Studi Pustaka

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muh. Agus Mallarangang akrab disapa Agus, lahir di Takalar Provinsi Sulawesi Selatan Pada 16 Agustus 1999. Penulis adalah anak bungsu dari dua bersaudara dari pasangan Darwis Dg. Malli dan Mariyati Dg. Jipa. Dalam sejarah akademis penulis telah menyelesaikan studi di SDN

No. 13 Bontolebang 1 (2005-2011), SMPN 4 Takalar (2011-2014), SMAN 1 Polongbangkeng Selatan (2014-2017), Kemudian Pada Tahun 2017 Penulis diterima menjadi mahasiswa Jurusan Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Melalui Jalur SPAN-PTKIN

Penulis pernah menjabat sebagai anggota HMJ Hukum TataNegara selama 1 Tahun kepengurusan pada tahun 2017-2018. Serta sebagai anggota dari Alauddin Law Study Centre (ALSC) Periode 2018-2019

Rasa Syukur tak henti penulis ucapkan, karena diberikan kesempatan untuk mengecap pendidikan perguruan Tinggi di UIN Alauddin Makassar dengan Beasiswa Bidikmisi dan berharap di kemudian hari ilmu yang diberikan oleh para dosen, organisasi, dan teman seperjuangan Jurusan Hukum TataNegara dapat menjadi bekal di dunia dan akhirat, dengan mengamalkannya pula.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR